



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERUYAN**

TAHUN 2026



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 304 /2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian pada rencana kerja perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Kabupaten Seruyan Tahun 2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026;
- KETIGA** : Sistematisa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB V : PENUTUP.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Juli 2025

 **BUPATI SERUYAN,**

AHMAD SELANORWANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 304 /2025
TANGGAL 29 Juli 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
8	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
21	Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
26	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan
28	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
30	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
32	Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan
33	Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan
34	Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
35	Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan
36	Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
37	Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
38	Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan
39	Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan



BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL
TAHUN 2026**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkat Ridho-Nya jualah sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini dapat kami susun. Dan kepada semua pihak yang telah terlibat sumbangsihnya baik tenaga, pemikiran dukungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) ini kami mengucapkan terima kasih.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Bidang Sosial. Rencana Kerja ini memuat gambaran tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya, Tujuan, Sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2026.

Kami menyadari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangan dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan selanjutnya, dan kami akan terus memperbaikinya dalam rangka pengelolaan tata pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan partisipatif.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan kegiatan, sehingga cita-cita pembangunan bidang Sosial Kabupaten Seruyan dapat tercapai.

Kuala Pembuang, 22 Juli 2025
Kepala Dinas,

ANGGA, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680405 198703 1 010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	4
1.2 Dasar Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU	14
2.1 Evaluasi Terhadap Capaian Renstra Dinas Sosial.....	14
2.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	18
2.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	20
2.2. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sampai Dengan Tahun 2024	30
2.3 Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong Dalam Pelaksanaan Renja Tahun 2024.....	40
2.4 Evaluasi Terhadap Realisasi Anggaran Tahun 2024	42
2.5 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	45
2.5.1. Kinerja Pelayanan Dari Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	45

2.5.2	Kinerja Pelayanan Dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2024	47
2.5.3	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	49
2.5.4	Capaian Atas Asersi Sektor Kemiskinan dan Penangan Stunting	50
2.6	Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.....	55
2.7	Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	56
2.8	Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024.	67
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL		68
3.1	Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Sosial.....	71
3.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	73
3.2.1.	Program Dinas Sosial berdasarkan Urusan Wajib (Urusan Sosial)	75
3.2.2	Program Dinas Sosial berdasarkan Urusan Penunjang	77
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL		79
4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026.....	80
4.2	Matrik Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Sosial	84



4.3	Program Dan Kegiatan Pendukung Upaya Pengentasan Kemiskinan, dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM)	98
4.3.1	Program dan Kegiatan Pendukung Pengentasan Kemiskinan	121
4.3.2	Program dan Kegiatan Pendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM).....	102
4.4	Integrasi Program Dinas Sosial Pendukung Program Prioritas Janji Politik Bupati, Janji Politik Gubernur Dan Janji Politik Presiden Tahun 2026.....	104
4.5	Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dan Aspirasi Masyarakat.....	109
BAB V.	PENUTUP	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Aturan tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ketentuan pasal 82 ayat (2) dan pasal 83, bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah. Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja perangkat daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta dapat

memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Dalam menyusun Renja Tahun 2026 Dinas Sosial menggunakan Rincian Belanja dan memetakan setiap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan atau Prioritas Kabupaten Tahun 2026, diantaranya:

- 1) Optimalisasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- 2) **Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem.**
- 3) Peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- 4) Pengembangan potensi agroindustri daerah.
- 5) Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah.
- 6) Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan.
- 7) Meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup pada aktivitas perekonomian.
- 8) Penanganan Stunting.

- 9) Pariwisata.
- 10) Ketahanan Pangan.
- 11) Pemberdayaan UMKM.
- 12) **Pengendalian inflasi.**
- 13) Peningkatan investasi.

Ada 3 (tiga) Prioritas Kabupaten Seruyan Tahun 2026 yang didukung oleh Program Kegiatan Dinas Sosial terkait Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan Pengendalian inflasi.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagai salah satu perangkat daerah teknis yang menjalankan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program Utama Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan serta Program Penunjang Administrasi Perkantoran yang diharapkan dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga ada konsistensi antara kewenangan Dinas dengan kebutuhan riil pelayanan bidang Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Seruyan. Di sisi yang lain, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026, serta dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, dan diatur tata kelola organisasinya berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah disektor Kesejahteraan Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan melaksanakan Fungsi sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- b. Pengumpulan Sumbangan dalam daerah;
- c. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
- d. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;

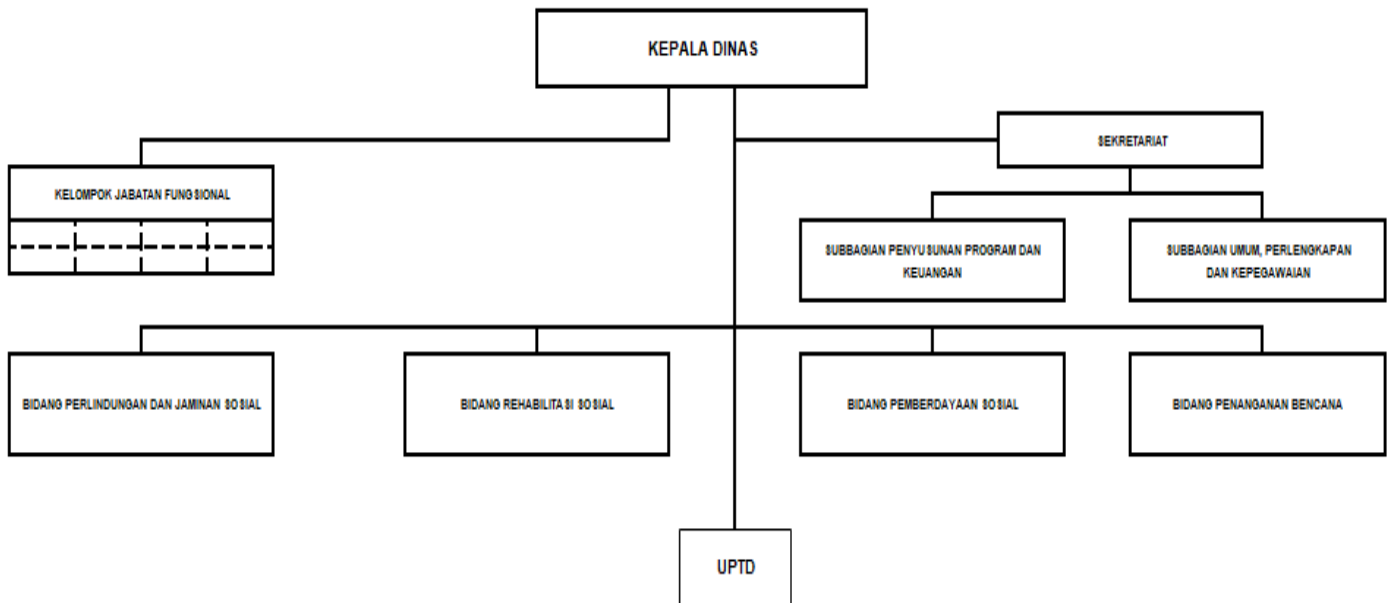
- e. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
- f. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
- g. Pemeliharaan Anak-anak terlantar;
- h. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah;
- i. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
- j. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana; dan
- k. Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- f. Bidang Penanganan Bencana;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- i. UPTD.



Tabel 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan



Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Menurut jenis kelamin terdiri dari :
 - Laki-laki : 13 orang
 - Perempuan : 10 orang
2. Menurut golongan terdiri dari :
 - Golongan IV : 6 orang
 - Golongan III : 15 orang
 - Golongan II : 2 orang
3. Menurut eselon terdiri dari :
 - Eselon IV : 2 orang
 - Eselon III : 5 orang
 - Eselon II : 1 orang
4. Menurut pendidikan terdiri dari :

- SLTA : 3 orang
- D.III : 2 orang
- S-1 : 13 orang
- S-2 : 5 orang

Selain tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibantu dengan tenaga honorer/kontrak bidang administrasi sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Adapun keberadaan / eksisting Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Existing Pegawai Dinas Sosial

NO URUT	NAMA JABATAN	STATUS ASN		KELAS JABATAN
		PNS	HONORER	
1	KEPALA DINAS	1	-	14
2	PEKERJA SOSIAL MADYA	-	-	11
3	PEKERJA SOSIAL MUDA	5	-	10
4	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	-	-	8
5	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA TERAMPIL	-	-	6
6	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA PEMULA	1	-	5
7	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA	-	-	9
8	PERENCANA MADYA	-	-	11
9	PERENCANA MUDA	-	-	10
10	PERENCANA PERTAMA	-	-	8
11	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	-	-	7
12	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	-	-	6
13	SEKRETARIS	1	-	13
14	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	1	-	9
15	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	3	7
16	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
17	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	-	5
22	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN	1	-	9
23	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	-	7
	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
24	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	3	5
29	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	-	11
30	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	-	7
31	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	1	6
32	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	1	5
35	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	1	-	11
36	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	1	7
37	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
38	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	5	5
41	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	-	11
42	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	1	7
43	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	1	6
44	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	1	5
47	KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA	1	-	11
48	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	3	7
49	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
50	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	1	5
JUMLAH		23	21	

1.3 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

- Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 37 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan

- Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
21. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan;
 22. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 Nomor 21).

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dimaksudkan untuk :

- 1) Menentukan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah bidang kesejahteraan sosial Tahun 2026;
- 2) Mewujudkan Harmonisasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah bidang kesejahteraan sosial Tahun 2026;
- 3) Memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dalam RENJA telah memuat Indikator dan Target Kinerja (Capaian, Outcome dan Output), Kelompok Sasaran, Lokasi dan Pagu Indikatif serta Prakiraan Maju dan mendukung Prioritas Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah untuk :

- 1) Sebagai arahan bagi Dinas untuk melaksanakan Pembangunan Daerah bidang kesejahteraan sosial dalam merumuskan dan menyusun Perencanaan serta partisipasi dalam Pembangunan Daerah Tahun 2026;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

- Anggaran 2026, dan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026;
- 3) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan dan keterpaduan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah secara umum dan secara khusus untuk Pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
 - 4) Instrumen bagi Dinas Sosial untuk mengukur target kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib bidang Sosial pada Pemerintahan Daerah;
 - 5) Instrumen bagi Dinas Sosial sebagai acuan penyusunan laporan LPPD, LKjIP, dan LKPJ.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 disusun dalam 5 (Lima) bab, sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

Memuat latar belakang, gambaran umum organisasi, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Bab. II Hasil Evaluasi Renja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Lalu

Memuat Evaluasi Terhadap Capaian Renstra Dinas Sosial, Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sampai Dengan Tahun 2024, Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong Dalam Pelaksanaan Renja Tahun 2024, Evaluasi Terhadap Realisasi Anggaran Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Review Terhadap RKPd dan Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

Bab. III Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

Memuat Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Sosial dan Program dan Kegiatan.

Bab. IV Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

Memuat Program Dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dan Matrik Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Sosial.

Bab. V Penutup

Memuat uraian tentang hal – hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak agar Renja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 berdaya guna.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

Peran Dinas Sosial sebagai fasilitator dan dinamisator dalam pembangunan kesejahteraan sosial di kabupaten seruyan dapat terwujud secara adil dan profesional melalui perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat spesifik yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Selain itu juga perencanaan kegiatan skala prioritas yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, sesuai dengan hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana berdasarkan indikator kinerja, namun demikian dalam rangka pelaksanaannya masih ada kendala yaitu faktor anggaran yang di alokasi Dinas Sosial belum maksimal dimana komposisi dan struktur anggaran yang diusulkan sering kali tidak dapat terealisasi seluruhnya. Hal ini membawa konsekuensi perlunya revisi terhadap Program dan kegiatan yang sudah di usulkan. Optimalisasi hasil kegiatan menjadi berkurang disebabkan alokasi anggaran yang terbatas sehingga mempengaruhi pencapaian target yang telah di tentukan. Hal ini diharapkan menjadi pertimbangan pemangku kebijakan agar alokasi anggaran untuk Dinas Sosial dapat di maksimalkan sesuai dengan yang diusulkan melalui Renja.

2.1 EVALUASI TERHADAP CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL

Capaian Kinerja dari Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Menurunkan Jumlah Pemerlu	Tingkat Penurunan Jumlah	Meningkatkan Penanganan terhadap	Persentase Pemerlu Pelayanan	100 %	95,76 %	95,76 %

	Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani			
2.	Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial	B Baik	CC	CC Nilai 58,30 (Cukup Memadai)

Tujuan (Urusan Wajib Sosial) Dinas Sosial adalah Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator Tingkat Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dan Sasaran (Urusan Wajib Sosial) Dinas Sosial adalah Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani. Ditetapkan target mencapai maksimal 100% (seratus persen) dalam setiap tahun. Diharapkan 26 (dua puluh enam) elemen PPKS dapat terdata dan tertangani secara optimal selama jangka waktu 3 (tahun) tahun dan jumlah PPKS bisa menurun secara signifikan.

Sampai dengan Tahun 2024 capaian kinerja pelayanan urusan sosial terealisasi 95,76% dari target kinerja 100%. Dengan perhitungan Penanganan terhadap PPKS sebanyak 41.893 jiwa dari target PPKS yang terdata 43.746 jiwa. Terdapat penurunan jumlah PPKS sebanyak 8.108 jiwa dari tahun sebelumnya (2023) sebanyak 50.001 jiwa. Pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2024-2026 terealisasi tingkat penurunan jumlah PPKS sebesar 16,22%.

Penurunan jumlah PPKS yang signifikan disebabkan antara lain oleh:

1. Telah dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui verifikasi dan validasi data di lapangan.
2. Tidak terjadi Bencana Alam Banjir yang berdampak besar bagi korban bencana di kabupaten Seruyan.
3. Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal melalui layanan rehabilitasi sosial dan penanganan bencana.
4. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial berupa pemberian

Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT, Program Penjaminan Kesehatan PBI JKN KIS, Bansos Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan Bansos Yatim Piatu (YAPI) dan Bansos untuk korban bencana.

Diharapkan untuk beberapa tahun kedepan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terus menurun secara signifikan, yang menandakan salah satu indikator perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin membaik dan dapat tujuan prioritas mengentaskan kemiskinan.

Tujuan (Urusan Penunjang) Dinas Sosial adalah Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Dan Sasaran (Urusan penunjang) Dinas Sosial adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial. Ditetapkan target capaian B (Baik) dalam setiap tahun.

Sampai dengan Tahun 2024 capaian kinerja pelayanan urusan administrasi penunjang terealisasi grade CC dari target kinerja B. Dengan perhitungan nilai 58,30 predikat Cukup Memadai. Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian masih banyak perlu perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial.

Terdapat penurunan capaian kinerja dibandingkan dari tahun sebelumnya (2023) dengan nilai B nilai 60,6 grade B. Penurunan capaian kinerja penunjang disebabkan kelemahan dalam penyusunan, kualitas dan implementasi SAKIP tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 yang dinilai pada tahun 2024 dalam 4 (empat) tahapan yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pelaksanaan Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja

Rekomendasi perbaikan SAKIP dari hasil LHE SAKIP Dinas Sosial telah ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi dengan APIP dan BAPPEDA yang menjadi leading sektor perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Serta melakukan tindak lanjut dengan memperbaiki :

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Melakukan reviu dokumen perencanaan / menganalisis capaian kinerja
 - b. Memperbaiki indikator kinerja yang belum SMART
 - c. Menyajikan hubungan antar bidang terkait kinerja dan anggaran dalam dokumen perencanaan
2. Pelaksanaan Kinerja
 - a. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang disajikan dalam pelaporan secara formal perbulan / pertriwulan
 - b. Membahas pengukuran kinerja pada bidang dengan melibatkan seluruh pegawai yang ada
 - c. Memaksimalkan teknologi atas pengumpulan dan pengukuran data kinerja dengan penggunaan aplikasi offline maupun online.
3. Pelaporan Kinerja
 - a. Menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah tepat waktu
 - b. Menyusun laporan kinerja sesuai standar Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014
 - c. Melampirkan data dukung pada dokumen Laporan Kinerja
 - d. Membahas capaian kinerja program kegiatan pada bidang-bidang teknis dengan melibatkan seluruh pegawai yang ada
4. Evaluasi Kinerja
 - a. Meningkatkan kualitas SDM terkait SAKIP dengan mengikuti Diklat / Bimtek / Webinar
 - b. Mengoptimalkan penggunaan teknologi aplikasi dalam melakukan evaluasi internal

2.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah.

Berikut ini capaian indikator kinerja utama pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sampai dengan Tahun 2024 yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Keluaran / Output Capaian Kinerja Program
Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Target Indikator	Satuan Indikator	Realisasi Keluaran /Output
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja	100	%	92,75
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	100	%	42,50
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota yang berkembang	100	%	135,71
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	100	%	100
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100	%	60,71
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti Sosial	100	%	80
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	100	%	100

	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	%	100
	Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100	%	100
	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100	%	60,71
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin cakupan kabupaten /kota	100	%	88,63
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	100	%	100
	Persentase masyarakat (KSB dan Taruna Siaga Bencana) yang siap siaga terhadap bencana Kab / Kota	100	%	92,96
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik	100	%	77,78
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Kegiatan				87,98%

Dari 6 (enam) Program Urusan Wajib Sosial dan 1 (satu) Program Penunjang sampai dengan Tahun 2024 telah mencapai realisasi rata-rata kinerja program kegiatan sebesar 88,91%, dengan predikat penilaian kinerja “tinggi”. Ada 2 (dua) indikator Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Sosial masih rendah (dibawah 75%) yaitu untuk indikator kinerja outcome :

1. Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Seruyan dari target 100% terealisasi 42,50% disebabkan karena banyak penyelenggaraan PUB dan UGB tanpa Izin, disebabkan rendahnya kesadaran penyelenggara PUB dan UGB, dan kurang intensif sosialisasi dan penertiban / razia Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
2. Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dari target 100% terealisasi 60,71% disebabkan

karena sebagian besar output sub kegiatan tersebut diatas tergantung dari kasus / aduan dari PPKS dan layanan sudah di arahkan pada penerapan SPM

2.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disempurnakan pada indikator urusan pelayanan umumnya melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah yang merupakan tanggungjawab Dinas Sosial Kabupaten Seruyan diuraikan pada Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2024 sesuai tabel berikut:

Tabel 2.3
Realisasi Sasaran (Dampak/Impact) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran (Dampak/Impact)	Satuan	Target	Capaian	Ket
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	persen	100	95,76	Sangat baik
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial	grade	B	CC	Cukup memada i

Adapun Indikator Kinerja Kunci daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah yang merupakan

tanggungjawab Dinas Sosial Kabupaten Seruyan diuraikan pada Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2024, sesuai tabel berikut :

Tabel 2.4
Realisasi Outcome Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Capaian
			2024
1	Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Seruyan	Persen	42,50
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persen	135,71
3	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	100
4	Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Persen	95
5	Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persen	60,71
6	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin cakupan kabupaten /kota	Persen	88,63
7	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	Persen	100
8	Persentase masyarakat (KSB dan Taruna Siaga Bencana) yang siap siaga terhadap bencana Kab / Kota	Persen	92,96
9	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik	Persen	77,78

Berikut penjelasan capaian kinerja Dinas Sosial :

Tabel 2.5
Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Outcome

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	Penjelasan capaian	
		Faktor Pendukung	Faktor Kendala/Penghambat
1	Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Seruyan	Adanya kemudahan proses perizinan dapat membantu Lembaga / Pribadi Penyelenggara PUB dan UGB untuk mengurus izin sumbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran penyelenggaraan PUB / UGB 2. Kurangnya sosialisasi tentang izin PUB /UGB 3. Kurangnya koordinasi pelaksanaan razia / penertiban PUB / UGB
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Target indikator pemberdayaan sosial dapat tercapai melampaui target dengan adanya Pelatihan bagi PSKS yang diadakan oleh Dinas Sosial / Balai pelatihan 2. Adanya pendampingan dari BBPPKS untuk pendataan dan asistensi akreditasi LKS 	Masih banyak Relawan Sosial yang belum bersertifikat uji kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial
3	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jaringan Komunikasi yang terbentuk memudahkan penelusuran dan reunifikasi keluarga bagi Orang Terlantar yang ditangani	Proses pemulangan estapet antar Dinas Sosial Provinsi / Kabupaten



4	Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Assesment awal dan Verifikasi/ validasi data DTKS membantu memilah PMKS yang layak mendapat bantuan sosial / perlu penanganan lain berupa bimbingan, pelatihan, reunifikasi, rujukan dan layanan lainnya	Kegagalan rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental karena kurangnya dukungan keluarga pasca rehab sehingga gangguan mental rawan kambuh
5	Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penanganan terhadap PMKS selain pemberian Bansos juga berupa layanan reunifikasi, assesment kebutuhan PMKS, pendampingan dan peningkatan keterampilan PMKS	Penanganan tergantung kasus / aduan dari masyarakat
6	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin cakupan kabupaten /kota	Adanya Bansos bersumber dana APBD (Bansos BLT, Bansos permakanan, sandang dan alat bantu) di tambah dengan bansos bersumber dana APBN (PKH, Sembako, dan PBI) dapat mencukupi pemberian bansos bagi PMKS Kabupaten Seruyan	Perlu dukungan anggaran untuk verifikasi dan validasi DTKS agar pemberian Bansos dapat tepat sasaran
7	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	Tersediannya stok opname persediaan permakanan, sandang, dan perlengkapan dapur di Gudang Logistik mendukung penyaluran bantuan tanggap darurat bisa tepat waktu	Minimnya kendaraan operasional untuk mendistribusikan bantuan sosial kepada korban bencana alam/sosial
8	Persentase masyarakat (KSB dan Taruna Siaga Bencana) yang siap siaga terhadap bencana Kab / Kota	Koodinasi berbagai OPD terkait dan kesiapsiagaan TAGANA dan KSB mempercepat penanganan dan evakuasi terhadap warga terdampak bencana yang perlu di evakuasi	Kondisi sarana prasarana peralatan evakuasi yang sebagian besar rusak memerlukan biaya operasional pemeliharaan
9	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik	Koordinasi dengan Aparatur Kecamatan untuk pengelolaan TMP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang jauh (di Kec. Hanau dan Seruyan Hulu) menyebabkan rehabilitasi TMP tidak maksimal 2. Tidak ada sarana WC umum di Taman Makam Pahlawan

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 (Tabel TC.19)
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan 2024
Dinas Sosial kabupaten Seruyan

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome /output)	Capaian Kinerja RPJMD s/d 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d TW IV Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja					100	Persen	6.627.420.800			95,77	Persen	6.002.003.731	95,77	6.002.003.731
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)					100	Persen	129.910.950			100,00	Persen	138.854.400	100,00	138.854.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Dokumen				0,00	Dokumen	-	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD						Dokumen				0,00	Dokumen	-	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Dokumen				0,00	Dokumen	-	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD						Dokumen				0,00	Dokumen	-	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD						Dokumen				0,00	Dokumen	-	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1	Laporan	109.960.000			1,00	Laporan	114.283.900	1,00	114.283.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4	Laporan	19.950.950			4,00	Laporan	24.570.500	4,00	24.570.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100	Persen	3.507.780.708			96,00	Persen	3.422.269.445	96,00	3.422.269.445
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					25	Orang/bulan	3.507.780.708			24,00	Orang/bulan	3.422.269.445	24,00	3.422.269.445
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jenis honorarium yang dibayarkan						Dokumen					Dokumen		0,00	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPP dan SPM yang diterbitkan						Dokumen					Dokumen		0,00	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD						Dokumen					Dokumen		0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun						Laporan				0,00	Laporan	-	0,00	-



Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan							Dokumen					Dokumen		0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun							Laporan		0,00			Laporan	-	0,00	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran							Dokumen					Dokumen		0,00	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						100	Persen	441.749.400				Persen	-	0,00	-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							Dokumen					Dokumen		0,00	-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							Dokumen					Dokumen		0,00	-
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah							Laporan					Laporan		0,00	-
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							Laporan		0,00			Laporan	-	0,00	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							Laporan		0,00			Laporan	-	0,00	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							Laporan					Laporan		0,00	-
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD							Dokumen					Dokumen		0,00	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100	Persen	220.874.700				Persen	234.890.640	90,00	234.890.640
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							Unit					Unit		0,00	-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						63	Paket	170.924.700		61,00		Paket	125.813.800	61,00	125.813.800
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							Dokumen		0,00			Dokumen	-	0,00	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							Dokumen					Dokumen		0,00	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							Dokumen					Dokumen		0,00	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						10	Orang	49.950.000		4,00		Orang	23.105.038	4,00	23.105.038
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							Orang					Orang	-	0,00	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						7	Orang			7,00		Orang	85.971.802	7,00	85.971.802
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100	Persen	846.127.150				Persen	1.021.817.632	93,40	1.021.817.632
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						2	Paket	17.536.000		4,00		Paket	21.472.500	4,00	21.472.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						3	Paket	215.546.100		5,00		Paket	228.308.350	5,00	228.308.350
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						2	Paket	36.205.100		6,00		Paket	23.788.700	6,00	23.788.700
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						3	Paket	181.990.950		2,00		Paket	188.336.850	2,00	188.336.850
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						3	Paket	53.477.000		5,00		Paket	63.950.500	5,00	63.950.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						1406	Dokumen	15.540.000		1.300,00		Dokumen	10.560.000	1.300,00	10.560.000



Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan								Paket				Paket		0,00	-
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu								Laporan				Laporan		0,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50			Laporan	325.832.000		50,00	Laporan	485.400.732	50,00	485.400.732
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								Dokumen				Dokumen		0,00	-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								Dokumen				Dokumen		0,00	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100			Persen	101.677.600		0,00	Persen	-	0,00	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								Unit				Unit		0,00	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					10			Unit	41.500.000		0,00	Unit	-	0,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								Unit			0,00	Unit	-	0,00	-
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara								Unit				Unit		0,00	-
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi								Unit				Unit		0,00	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi								Unit				Unit		0,00	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi					1			Unit	60.177.600		0,00	Unit	-	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100			Persen	932.761.884		95,20	Persen	809.143.264	95,20	809.143.264
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim					850			Laporan	11.220.000		800,00	Laporan	19.120.000	800,00	19.120.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kwh Rekening Listrik yang dibayarkan 1 tahun					1			Laporan	92.635.500		6,00	Laporan	70.630.024	6,00	70.630.024
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					3			Laporan	54.204.400		1,00	Laporan	41.197.000	1,00	41.197.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Keuangan yang Dibayarkan					1			Laporan	774.701.984		7,00	Laporan	678.196.240	7,00	678.196.240
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang yang Dipelihara terhadap Jumlah Seluruh Aset di Dinas Sosial					100			Persen	446.538.408		100,00	Persen	375.028.350	100,00	375.028.350
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas / Jabatan Yang dipelihara					10			Unit	103.408.000		10,00	Unit	136.163.100	10,00	136.163.100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas / Operasional Yang dipelihara					4			Unit	92.110.000		4,00	Unit	81.765.250	4,00	81.765.250
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubel yang Dipelihara								Unit				Unit		0,00	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki/dipelihara								Unit				Unit		0,00	-
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang diperbaiki/ dipelihara								Unit				Unit		0,00	-
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara								Unit				Unit		0,00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung/Kantor yang Dipelihara								Unit				Unit		0,00	-



Memeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara						1	Unit	251.020.408			1,00	Unit	157.100.000	1,00	157.100.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Seruyan						100	Persen	253.053.000			42,50	Persen	186.305.400	42,50	186.305.400
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial						100	Persen				135,71	Persen	-	135,71	-
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang						100	Persen	17.000.000			42,50	Persen	14.526.900	42,50	14.526.900
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						40	Dokumen	17.000.000			17,00	Dokumen	14.526.900	17,00	14.526.900
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota yang berkembang						100	Persen	236.053.000			135,71	Persen	171.778.500	135,71	171.778.500
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						10	Orang	20.000.000			12,00	Orang	11.768.400	12,00	11.768.400
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota						10	Orang	19.000.000			14,00	Orang	13.271.400	14,00	13.271.400
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota						2	Keluarga	12.000.000			2,00	Keluarga	2.290.400	2,00	2.290.400
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota						5	Lembaga	165.053.000			9,00	Lembaga	134.680.100	9,00	134.680.100
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota						1	Sertifikat	20.000.000			1,00	Sertifikat	9.768.200	1,00	9.768.200
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan						100	%	24.960.000			100,00	%	2.828.100	100,00	2.828.100
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						100	%	24.960.000			100,00	%	2.828.100	100,00	2.828.100
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Kabupaten Seruyan untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal						2	Orang	24.960.000			2,00	Orang	2.828.100	2,00	2.828.100
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya di Luar Pantli Sosial sesuai SPM						100	Persen	441.744.300			95,00	Persen	360.230.192	95,00	360.230.192
	Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial						100	Persen				60,71	Persen	-	60,71	-
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Pantli Sosial						100	Persen	367.177.550			95,00	Persen	303.191.892	95,00	303.191.892

Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																			
	Persentase Penyandang Anak Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti																		
	Persentase Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti																		
	Persentase Penyandang Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti																		
Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																		
Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Penyediaan Alat Bantu	umlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota																		



Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota					5	Orang	14.878.000			1,00	Orang	4.371.400	1,00	4.371.400
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota						Orang				0,00	Orang	-	0,00	-
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota						Orang				0,00	Orang	-	0,00	-
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						Orang				0,00	Orang	-	0,00	-
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					5	Orang	19.992.000			5,00	Orang	3.031.400	5,00	3.031.400
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota						Orang				0,00	Orang	-	0,00	-
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					2	Dokumen	4.698.000			2,00	Dokumen	6.406.800	2,00	6.406.800
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin cakupan kabupaten /kota					100	Persen	1.730.000.000			88,63	Persen	464.211.367	88,63	464.211.367
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota					100	Persen	1.730.000.000			88,63	Persen	464.211.367	88,63	464.211.367
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata					55388	Orang	135.000.000			41.046,00	Orang	124.260.200	41.046,00	124.260.200
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Keluarga Penerima Manfaat yang dikelola Kabupaten/Kota					22432	Keluarga	45.000.000			18.393,00	Keluarga	44.358.735	18.393,00	44.358.735
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					10000	Keluarga	1.550.000.000			18.393,00	Keluarga	295.592.432	18.393,00	295.592.432
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						Orang				0,00	Orang		0,00	-
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota					100	Persen	397.746.050			100,00	Persen	479.779.340	100,00	479.779.340
	Persentase masyarakat (KSB dan Taruna Siaga Bencana) yang siap siaga terhadap bencana Kab/Kota					100	Persen				92,96	Persen	-	92,96	-
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota					100	Persen	249.995.900			100,00	Persen	301.553.550	100,00	301.553.550
	Persentase Korban Bencana Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota					100	Persen				100,00	Persen	-	100,00	-
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota					100	Orang	50.549.100			164,00	Orang	142.001.240	164,00	142.001.240
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					50	Orang	43.194.800			51,00	Orang	27.435.600	51,00	27.435.600
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota					10	Unit	24.998.900			11,00	Unit	22.546.550	11,00	22.546.550
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota					20	Orang	81.253.350			35,00	Orang	67.864.600	35,00	67.864.600



Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota						100	Orang	49.999.750			164,00	Orang	41.705.560	164,00	41.705.560
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota						100	Persen	147.750.150			92,96	Persen	178.225.790	92,96	178.225.790
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						2	Kampung	49.999.800			2,00	Kampung	69.445.190	2,00	69.445.190
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						69	Orang	97.750.350			64,00	Orang	108.780.600	64,00	108.780.600
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik						100	Persen	54.825.250			77,78	Persen	44.148.550	77,78	44.148.550
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						100	Persen	54.825.250			77,78	Persen	44.148.550	77,78	44.148.550
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota						3	Dokumen	26.874.250			1,00	Dokumen	23.253.650	1,00	23.253.650
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota						3	Makam	18.951.000			3,00	Makam	18.594.900	3,00	18.594.900
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						3	Makam	9.000.000			3,00	Makam	2.300.000	3,00	2.300.000
									9.529.749.400							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0%		88,91		88,91
Predikat Kinerja												0%		88,91		88,91



2.2 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

Hasil evaluasi pencapaian kinerja urusan sosial sampai dengan 2024 bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Sosial, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7 (E.81)
Evaluasi Terhadap Hasil RENJA Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Reralisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)							
								I		II		III		IV													
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Seruyan	300	Persen	1.039.000.000	Persen	100	Persen	253.053.000	27,5	Persen	2,5	Persen	5.221.400	10	Persen	2.035.400	0,00	Persen	179.048.600	42,50	Persen	186.305.400	42,50	Persen	186.305.400	14,17	17,93
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	300	Persen		Persen	100	Persen		3,57	Persen	3,57	Persen		53,57	Persen	0	0,00	Persen		135,71	Persen	0	135,71	Persen		45,24	
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	300	Persen	62.000.000	Persen	100	Persen	17.000.000	27,5	Persen	2,50	Persen	2.035.400	10,00	Persen	0	0,00	Persen	12.491.500	42,50	Persen	14.526.900	42,50	Persen	14.526.900	14,17	23,43
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	135	Dokumen	62.000.000	Dokumen	40	Dokumen	17.000.000	11	Dokumen	1,00	Dokumen	2.035.400	4,00	Dokumen	0	1,00	Dokumen	12.491.500	17	Dokumen	14.526.900	17,00	Dokumen	14.526.900	12,59	23,43
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang berkembang	300	Persen	977.000.000	Persen	100	Persen	236.053.000	3,57	Persen	3,57	Persen	3.186.000	53,57	Persen	2.035.400	0,00	Persen	166.557.100	135,71	Persen	171.778.500	135,71	Persen		45,24	#VALUE!
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	75.000.000	Orang	10	Orang	20.000.000	0	Orang	0,00	Orang		6,00	Orang	0	6,00	Orang	11.768.400	12	Orang	11.768.400	12,00	Orang	11.768.400	40,00	15,69
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	74.000.000	Orang	10	Orang	19.000.000	0	Orang	0,00	Orang	2.336.000	9,00	Orang	0	5,00	Orang	10.935.400	14	Orang	13.271.400	14,00	Orang	13.271.400	46,67	17,93
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Keluarga	47.000.000	Keluarga	2	Keluarga	12.000.000	1	Keluarga	0,00	Keluarga		0,00	Keluarga	0	2,00	Keluarga	2.290.400	2	Keluarga	2.290.400	2,00	Keluarga	2.290.400	33,33	4,87



Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																											
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Giz Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Orang	20.000.000	Orang	50	Orang	4.999.000	0	Orang	-	0,00	Orang	0,00	Orang	0	0,00	Orang	4.068.000	10	Orang	4.068.000	10,00	Orang	4.068.000	5,00	20,34	
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	15.000.000	Orang	20	Orang	5.000.000	0	Orang	-	0,00	Orang	0,00	Orang	0	0,00	Orang	-	-	Orang	0	0,00	Orang	-	-	-	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang		Orang		Orang			Orang			Orang		Orang			Orang	39.160.700		Orang			Orang		-	-	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Orang		Orang		Orang			Orang			Orang		Orang			Orang			Orang			Orang		-	-	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Orang		Orang		Orang			Orang			Orang		Orang			Orang			Orang			Orang		-	-	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Orang		Orang		Orang			Orang			Orang		Orang			Orang			Orang			Orang		-	-	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	95.000.000	Orang	50	Orang	24.999.750	0	Orang	-	0,00	Orang	0,00	Orang	0	50,00	Orang	39.160.700	50	Orang	39.160.700	50,00	Orang	39.160.700	333,33	41,22	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	22	Orang	57.500.000	Orang	5	Orang	14.878.000	1	Orang	-	0,00	Orang	4.371.400	0,00	Orang	0	0,00	Orang	-	1	Orang	4.371.400	1,00	Orang	4.371.400	4,55	7,60
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	26	Orang	18.000.000	Orang		Orang			Orang			Orang		Orang			Orang			Orang	0	0,00	Orang		-	-	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Orang	30.000.000	Orang		Orang			Orang			Orang		Orang			Orang			Orang	0	0,00	Orang		-	-	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Orang	15.000.000	Orang		Orang			Orang			Orang		Orang			Orang			Orang	0	0,00	Orang		-	-	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	17	Orang	70.000.000	Orang	5	Orang	19.992.000	1	Orang	-	1,00	Orang	3.031.400	8,00	Orang	0	0,00	Orang	-	5	Orang	3.031.400	5,00	Orang	3.031.400	29,41	4,33



	Kewenangan Kabupaten/Kota																											
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Orang	12.500.000	Orang		Orang		Orang			Orang			Orang				Orang	0	0,00	Orang	-	-	-			
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6	Dokumen	24.000.000	Dokumen	2	Dokumen	4.698.000	0	Dokumen	-	0,00	Dokumen		0,00	Dokumen	0	0,00	Dokumen	6.406.800	2	Dokumen	6.406.800	2,00	Dokumen	6.406.800	33,33	26,70
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin cakupan kabupaten/kota	300	Persen	1.659.563.345	Persen	100	Persen	1.730.000.000	76,46	Persen	26,62	48,72	Persen	16.205.921	25,82	Persen	272.915.014	0,00	Persen	148.465.599	88,63	Persen	464.211.367	88,63	Persen	464.211.367	29,54	27,97
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	300	Persen	1.659.563.345	Persen	100	Persen	1.730.000.000	76,46	Persen	26,62	48,72	Persen	16.205.921	25,82	Persen	272.915.014	0,00	Persen	148.465.599	88,63	Persen	464.211.367	88,63	Persen	464.211.367	29,54	27,97
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	134.888	Orang	430.000.000	Orang	553.88	Orang	135.000.000	4744.1	Orang	-	675	Orang	-	1070.00	Orang	120.462.200	1.070,00	Orang	3.798.000	41.046	Orang	124.260.200	41.046,00	Orang	124.260.200	30,43	28,90
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Keluarga Penerima Manfaat yang dikelola Kabupaten/Kota	67.296	Keluarga	270.000.000	Keluarga	224.32	Keluarga	45.000.000	1971.0	Keluarga	8.742.280.00	38.768	Keluarga	12.402.221	5607.00	Keluarga	11.552.014	22.432,00	Keluarga	11.661.700	18.393	Keluarga	44.358.735	18.393,00	Keluarga	44.358.735	27,33	16,43
Fasilitasi Bantuan Sosial Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000	Keluarga	280.000.000	Keluarga	100.00	Keluarga	1.550.000.000	0	Keluarga	17.820.333	3.340	Keluarga	3.803.700	1600,00	Keluarga	140.900.800	10.000,00	Keluarga	133.005.899	18.393	Keluarga	295.592.432	18.393,00	Keluarga	295.592.432	61,31	105,57
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	450	Orang	679.563.345	Orang		Orang			Orang			Orang		Orang				Orang	290.413.630	-	Orang		0,00	Orang		-	-
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	300	Persen	1.350.000.000	Persen	100	Persen	397.746.050	40,71	Persen	0	17,14	Persen	89.457.600	5,36	Persen	99.908.110	0,00	Persen	290.413.630	100,00	Persen	479.779.340	100,00	Persen	479.779.340	33,33	35,54
	Persentase masyarakat (KSB dan Taruna Slaga Bencana) yang siap siaga terhadap bencana Kab/Kota	300	Persen		Persen	100	Persen		28,17	Persen		29,58	Persen		33,80	Persen	0	0,00	Persen	-	92,96	Persen	0	92,96	Persen	-	30,99	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	300	Persen	1.050.000.000	Persen	100	Persen	249.995.900	40,71	Persen	0	17,14	Persen	53.467.600	5,36	Persen	55.311.610	0,00	Persen	192.774.340	100,00	Persen	301.553.550	100,00	Persen	301.553.550	33,33	28,72
	Persentase Korban Bencana Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	300	Persen		Persen	100	Persen		40,71	Persen		17,14	Persen		5,36	Persen	0	0,00	Persen	-	100,00	Persen	0	100,00	Persen	-	33,33	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Orang	210.000.000	Orang	100	Orang	50.549.100	57	Orang	-	10,00	Orang	4.532.100	3,00	Orang	13.547.900	34,00	Orang	123.921.240	164	Orang	142.001.240	164,00	Orang	142.001.240	54,67	67,62



Penyediaan Sandi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	170	Orang	175.000.000	Orang	50	Orang	43.194.800	0	Orang	-	6,00	Orang	7.445.800	3,00	Orang	2.105.000	9,00	Orang	17.884.800	51	Orang	27.435.600	51,00	Orang	27.435.600	30,00	15,68
Penyediaan Tempat Pemungutan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Unit	150.000.000	Unit	10	Unit	24.998.900	0	Unit	-	11,00	Unit	-	3,00	Unit	16.664.550	0,00	Unit	5.882.000	11	Unit	22.546.550	11,00	Unit	22.546.550	36,67	15,03
Pemanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	290.000.000	Orang	20	Orang	81.253.350	0	Orang	-	11,00	Orang	23.465.300	3,00	Orang	10.820.600	36,00	Orang	33.578.700	35	Orang	67.864.600	35,00	Orang	67.864.600	58,33	23,40
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Orang	225.000.000	Orang	100	Orang	49.999.750	57	Orang	-	10,00	Orang	18.024.400	3,00	Orang	12.173.560	59,00	Orang	11.507.600	164	Orang	41.705.560	164,00	Orang	41.705.560	54,67	18,54
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota	300	Persen	300.000.000	Perse	100	Perse	147.750.150	28,17	Persen	0	29,58	Persen	35.990.000	33,80	Persen	44.596.500	0,00	Persen	97.639.290	92,96	Persen	178.225.790	92,96	Persen	178.225.790	30,99	59,41
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Kampung	150.000.000	Kampung	2	Kampung	49.999.800	0	Kampung	-	1,00	Kampung	12.289.000	1,00	Kampung	4.311.400	2,00	Kampung	52.844.790	2	Kampung	69.445.190	2,00	Kampung	69.445.190	33,33	46,30
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	207	Orang	150.000.000	Orang	69	Orang	97.750.350	20	Orang	-	20,00	Orang	23.701.000	23,00	Orang	40.285.100	165,00	Orang	44.794.500	64	Orang	108.780.600	64,00	Orang	108.780.600	30,92	72,52
PROGRAM PENGUATAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik	300	Persen	311.000.000	Perse	100	Perse	54.825.250	0	Persen	0	11,11	Persen	-	22,22	Persen	0	0,00	Persen	44.148.550	77,78	Persen	44.148.550	77,78	Persen	44.148.550	25,93	14,20
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	300	Persen	311.000.000	Perse	100	Perse	54.825.250	0	Persen	0	11,11	Persen	-	22,22	Persen	0	0,00	Persen	44.148.550	77,78	Persen	44.148.550	77,78	Persen	44.148.550	25,93	14,20
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6	Dokumen	220.000.000	Dokumen	3	Dokumen	26.874.250	0	Dokumen	-	0,00	Dokumen	-	1,00	Dokumen	0	2,00	Dokumen	23.253.650	1	Dokumen	23.253.650	1,00	Dokumen	23.253.650	16,67	10,57
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	9	Makam	60.000.000	Makam	3	Makam	18.951.000	0	Makam	-	1,00	Makam	-	1,00	Makam	0	1,00	Makam	18.594.900	3	Makam	18.594.900	3,00	Makam	18.594.900	33,33	30,99
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	9	Makam	31.000.000	Makam	3	Makam	9.000.000	0	Makam	-	0,00	Makam	-	0,00	Makam	0	2,00	Makam	2.300.000	3	Makam	2.300.000	3,00	Makam	2.300.000	33,33	7,42
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perencanaan pada Unit Kerja	300	Persen	21.850.975.658	Perse	100	Perse	6.627.420.800	6,91	Persen	0	28,77	Persen	1.268.614.901	0,00	Persen	1.637.654.132	0,00	Persen	2.013.785.162	95,77	Persen	6.002.003.731	95,77	Persen	6.002.003.731	31,92	27,47
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	300	Persen	449.520.000	Perse	100	Perse	129.910.950	0	Persen	0	120,00	Persen	32.999.500	0,00	Persen	39.050.000	0,00	Persen	66.804.900	100,00	Persen	138.854.400	100,00	Persen	138.854.400	33,33	30,89
Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Dokumen	31.000.000	Dokumen		Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			0	0,00	Dokumen				



Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	3	Laporan			Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	-	-	-				
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	30	Laporan	48.000.000		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	0,00	Laporan	-	-	-					
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30	Laporan	16.000.000		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	0,00	Laporan	-	-	-					
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan			Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan			Laporan	-	-	-					
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	9	Dokumen			Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen			Dokumen	-	-	-					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300	%	650.882.726	%	100	Persen	220.874.700	0	Persen	0,00	Persen	0,00	Persen	0	0,00	Persen	163.786.640	90,00	Persen	234.890.640	90,00	Persen	234.890.640	30,00	36,09	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6	Unit			Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit			Unit	-	-	-					
Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	189	Paket	300.982.726		Paket	63	Paket	170.924.700	0	Paket	61,00	Paket	61.000.000	0,00	Paket	64.813.800	61	Paket	125.813.800	61,00	Paket	125.813.800	32,28	41,80		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	189	Dokumen	22.400.000		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	0,00	Dokumen	-	-	-					
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	Dokumen			Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen			Dokumen	-	-	-					
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	75	Dokumen			Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen			Dokumen	-	-	-					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang	99.000.000		Orang	10	Orang	49.950.000	0	Orang	0,00	Orang	10.104.000	1,00	Orang	13.001.038	4,00	Orang	23.105.038	4,00	Orang	23.105.038	13,33	23,34		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30	Orang	66.000.000		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	0	0,00	Orang	-	-	-					
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45	Orang	162.500.000		Orang	7	Orang		Orang		Orang		Orang	0,00	Orang	85.971.802	7,00	Orang	85.971.802	7,00	Orang	85.971.802	15,56	52,91		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300	%	1.679.966.600	%	100	Persen	846.127.150	11,50	Persen	10,82	Persen	191.868.322	32,88	Persen	201.297.000	0,00	Persen	554.252.210	93,40	Persen	1.021.817.632	93,40	Persen	1.021.817.632	31,13	60,82
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	36.887.040		Paket	2	Paket	17.536.000	0	Paket	2,00	Paket	4.705.000	2,00	Paket	8.656.000	0,00	Paket	8.111.500	4,00	Paket	21.472.500	66,67	58,21		
Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	Paket	278.038.800		Paket	3	Paket	215.546.100	2	Paket	0,00	Paket	33.358.050	3,00	Paket	32.217.850	0,00	Paket	162.732.450	5,00	Paket	228.308.350	55,56	82,11		
Penyediaan Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	71.628.480		Paket	2	Paket	36.205.100	2	Paket	2,00	Paket	8.660.550	2,00	Paket	5.100.700	0,00	Paket	10.027.450	6,00	Paket	23.788.700	100,00	33,21		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	Paket	283.575.000		Paket	3	Paket	181.990.950	2	Paket	0,00	Paket	50.467.050	0,00	Paket	37.690.150	0,00	Paket	100.179.650	2,00	Paket	188.336.850	22,22	66,42		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	9	Paket	164.955.360		Paket	3	Paket	53.477.000	1	Paket	1,00	Paket	14.814.000	3,00	Paket	12.500.000	0,00	Paket	36.636.500	5,00	Paket	63.950.500	55,56	38,77		



Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4218	Dokumen	51.832.320	Dokumen	1406	Dokumen	15.540.000	150	Dokumen	-	151,00	Dokumen	2.640.000	450,00	Dokumen	0	0,00	Dokumen	7.920.000	1.300,00	Dokumen	10.560.000	1.300,00	Dokumen	10.560.000	30,82	20,37
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Jenis Bahan / Material yang Disediakan	12	Paket		Paket		Paket			Paket			Paket		Paket				Paket			Paket			Paket	-	-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan		Laporan		Laporan			Laporan			Laporan		Laporan				Laporan			Laporan			Laporan	-	-	
Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	793.049.600	Laporan	50	Laporan	325.832.000	12	Laporan	74400100	3,00	Laporan	77.223.672	23,00	Laporan	105.132.300	0,00	Laporan	228.644.660	50,00	Laporan	485.400.732	50,00	Laporan	485.400.732	33,33	61,21
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15	Dokumen		Dokumen		Dokumen			Dokumen			Dokumen		Dokumen				Dokumen			Dokumen			Dokumen	-	-	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21	Dokumen		Dokumen		Dokumen			Dokumen			Dokumen		Dokumen				Dokumen			Dokumen			Dokumen	-	-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300	%	470.495.918	%	100	Persen	101.677.600	0	Persen	0	0	Persen	-	0	Persen	0	0,00	Persen	-	0	Persen	0	0,00	Persen	-	-	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit		Unit		Unit			Unit			Unit		Unit				Unit			Unit			Unit	-	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	Unit	96.000.000	Unit	10	Unit	41.500.000	0	Unit	-	0,00	Unit	-	0,00	Unit	0	0,00	Unit	-	-	Unit	0	0,00	Unit	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	72.400.000	Unit		Unit			Unit			Unit		Unit			-	Unit			Unit	0	0,00	Unit	-	-	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	Unit		Unit		Unit			Unit			Unit		Unit				Unit			Unit			Unit	-	-	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	0	Unit		Unit		Unit			Unit			Unit		Unit				Unit			Unit			Unit	-	1,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	0	Unit		Unit		Unit			Unit			Unit		Unit				Unit			Unit			Unit	-	2,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3	Unit	302.095.918	Unit	1	Unit	60.177.600	0	Unit	-	0,00	Unit	-	0,00	Unit	0	0,00	Unit	-	-	Unit	0	0,00	Unit	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terepenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300	%	2.741.676.224	%	100	Persen	932.761.884	6,78	Persen	131088280	29,94	Persen	147.241.217	29,82	Persen	249.173.034	0,00	Persen	281.640.733	95,20	Persen	809.143.264	95,20	Persen	809.143.264	31,73	29,51
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	2550	Laporan	35.904.000	Laporan	850	Laporan	11.220.000	55	Laporan	-	250,00	Laporan	5.500.000	250,00	Laporan	2.500.000	0,00	Laporan	11.120.000	800,00	Laporan	19.120.000	800,00	Laporan	19.120.000	31,37	53,25
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kwf Rekening Listrik yang dibayarkan 1 tahun	3	Laporan	336.672.360	Laporan	1	Laporan	92.635.500	1	Laporan	-	3,00	Laporan	7.561.217	2,00	Laporan	16.231.634	0,00	Laporan	46.837.173	6,00	Laporan	70.630.024	6,00	Laporan	70.630.024	200,00	20,98
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9	Laporan	97.190.400	Laporan	3	Laporan	54.204.400	1	Laporan	-	0,00	Laporan	7.690.000	0,00	Laporan	5.175.000	0,00	Laporan	28.332.000	1,00	Laporan	41.197.000	1,00	Laporan	41.197.000	11,11	42,39



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Keuangan yang Dibayarkan	3	Laporan	2.271.909.464	Laporan	1	Laporan	774.701.984	1	Laporan	131.088.288.0	3,00	Laporan	126.490.000	3,00	Laporan	225.266.400	0,00	Laporan	195.351.560	7,00	Laporan	678.196.240	7,00	Laporan	678.196.240	233,33	29,85
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang yang Dipelihara terhadap Jumlah Seluruh Aset di Dinas Sosial	300	%	834.950.000	%	100	Perse	446.538.408	6,67	Persen	0	6,67	Persen	49.986.500	40,00	Persen	61.249.350	0,00	Persen	263.792.500	100,00	Persen	375.028.350	100,00	Persen	375.028.350	33,33	44,92
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas / Jabatan Yang dipelihara	30	Unit	391.450.000	Unit	10	Unit	103.408.000	1	Unit	-	1,00	Unit	32.436.500	4,00	Unit	42.088.100	0,00	Unit	61.638.500	10,00	Unit	136.163.100	10,00	Unit	136.163.100	33,33	34,78
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas / Operasional Yang dipelihara	12	Unit	240.000.000	Unit	4	Unit	92.110.000	0	Unit	-	0,00	Unit	17.550.000	2,00	Unit	19.161.250	0,00	Unit	45.054.000	4,00	Unit	81.765.250	4,00	Unit	81.765.250	33,33	34,07
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubel yang Dipelihara	5	Unit		Unit		Unit			Unit			Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	-	-
Pemeliharaan Peralatan Kerja dan Perengkapan Kantor dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja dan Perengkapan Kantor yang diperbaiki/dipelihara	10	Unit		Unit		Unit			Unit			Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	-	-
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang diperbaiki/ dipelihara	0	Unit		Unit		Unit			Unit			Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	-	-
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	Unit		Unit		Unit			Unit			Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung/Kantor yang Dipelihara	0	Unit		Unit		Unit			Unit		0,00	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	203.500.000	Unit	1	Unit	251.020.408	0	Unit	-		Unit	-	0,00	Unit	0	0,00	Unit	157.100.000	1,00	Unit	157.100.000	1,00	Unit	157.100.000	33,33	77,20
				27.560.539.003				9.529.749.400			882.476.129			1.413.745.702			2.053.341.456			2.955.052.753			7.539.506.680			7.539.506.680		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)									19,464,65			14,881,18			47,272			2828100			88,91						29,635	15,475
Predikat Kinerja									19,46			14,88			47,27			282810			88,91						29,64	15,48

2.3 FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDORONG DALAM PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Renja Tahun 2024 berupa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan SKPD Dinas Sosial Kabupaten Seruyan antara lain :

a. Faktor Internal

1. Masih rendahnya Mutu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
2. Belum optimalnya Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Belum maksimalnya pemanfaatan Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Seruyan dalam membantu menanggulangi masalah social
4. Permasalahan data yang tidak valid sehingga pemberian bantuan tidak tepat sasaran.
5. Belum sempurnanya perencanaan dan penganggaran dalam mendukung pelaksanaan Program Kegiatan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
6. Kurangnya partisipasi dan kompetensi Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;
7. Terbatasnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan urusan wajib sosial dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran.

b. Faktor Eksternal

1. Masih tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di kabupaten Seruyan
2. Mentalitas miskin masyarakat yang berharap mendapatkan bantuan sosial yang menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran;
3. Data PPKS dari hasil MusDes dan MusKel tidak disampaikan secara periodik pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagai bahan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial pada SIKS-NG;
4. Penetapan dari Kementerian Sosial terkait Balai Rujukan untuk rehabilitasi sosial berada di termasuk zona/wilayah Jawa (Solo)

yang menyebabkan jangkauan dan pelayanan ODGJ terkendala jarak;

5. Masih banyak Desa/Kelurahan yang belum tersedia Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos);
6. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
7. Adanya pemahaman keliru bahwa penanganan permasalahan Sosial dianggap sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah (Dinas Sosial) yang berdampak pada berkurangnya empati / rasa kepedulian sosial masyarakat ketika terjadi permasalahan sosial.

Adapun faktor-faktor pendorong berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2024 dari segi :
 - a. Efektifitas pendanaan melalui penyesuaian pagu anggaran
 - b. Efisiensi penyerapan anggaran secara maksimal.
 - c. Tingkat capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan supaya selaras dan mencapai target yang sudah ditetapkan.
2. Konsistensi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran.
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan kepedulian sosial,
4. Adanya media sosial dan jaringan online untuk layanan dan aduan dari masyarakat, yang mendukung percepatan penanganan masalah sosial, menyebabkan respon pihak terkait bisa maksimal
5. Asistensi peningkatan kapasitas uji kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial dan Akreditasi LKS
6. Adanya Koordinasi yang baik antar Kecamatan/Desa mengenai data serta Sistem Aplikasi SIGN-G yang dapat mempermudah dalam pemutakhiran Data pada DTKS.

7. Peningkatan layanan publik terhadap masyarakat berupa :
 - a. Pra bentukan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Pusat Kesejahteraan Sosial yang sudah di verifikasi Kementerian Sosial;
 - b. Peningkatan kapasitas untuk kedaruratan bencana dan pemberian dukungan psikososial bagi korban bencana / kelompok rentan;
 - c. Penanganan kedaruratan penyandang disabilitas mental dan reunifikasi keluarga bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar;
 - d. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Terintegrasi dan Fasilitasi penyaluran bantuan.
8. Peningkatan layanan administrasi berupa pembuatan Front Office layanan di lobby Dinas Sosial dengan Pelayanan Gratis dan pamphlet yang berisi informasi kegiatan Dinas Sosial, penyediaan form layanan / aduan dan Form Survei Kepuasan Masyarakat.

2.4 EVALUASI TERHADAP REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan telah menetapkan program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan kedalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

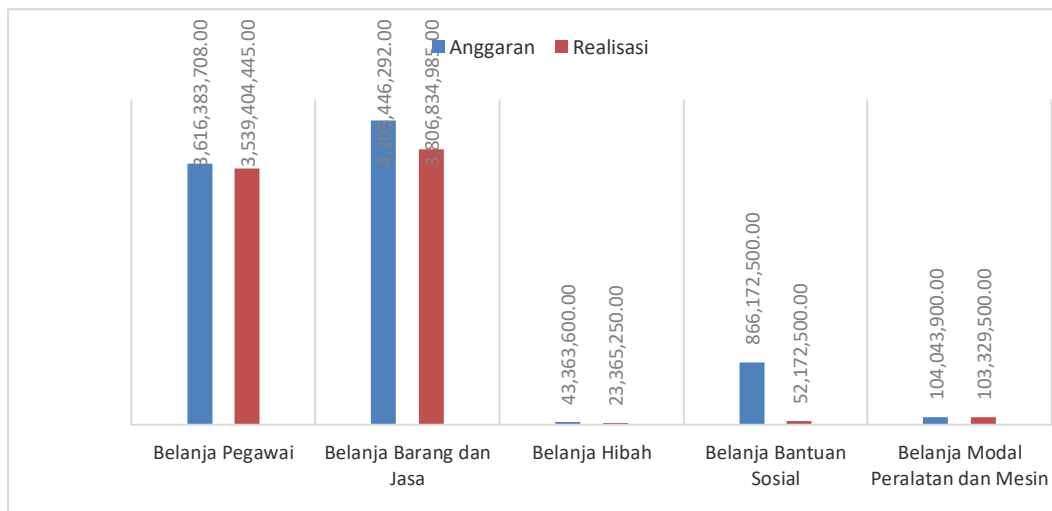
Anggaran Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 8.835.410.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.7.525.106.680,00 atau 85,17%, dimana belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, sebagaimana rincian tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024

No	Jenis Belanja Daerah	Anggaran	Realisasi	%
1	BELANJA OPERASI	8.731.366.100,00	7.421.777.180,00	85,00
	Belanja Pegawai	3.616.383.708,00	3.539.404.445,00	97,87
	Belanja Barang dan Jasa	4.205.446.292,00	3.806.834.985,00	90,52
	Belanja Hibah	43.363.600,00	23.365.250,00	53,88
	Belanja Bantuan Sosial	866.172.500,00	52.172.500,00	6,02
2	BELANJA MODAL	104.043.900,00	103.329.500,00	99,31
	Belanja Peralatan dan Mesin	104.043.900,00	103.329.500,00	99,31
JUMLAH		8.835.410.000,00	7.525.106.680,00	85,17

Pencapaian kinerja belanja daerah, dapat dilihat pada masing-masing jenis belanja pada grafik dibawah ini dimana Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. 8.731.366.100,00 mencapai realisasi sebesar Rp. 7.421.777.180,00 atau sebesar 85,00%. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 104.043.900,00 dengan realisasi sebesar Rp.103.329.500,00 atau sebesar 99,31%. Kenaikan dan penurunan kinerja belanja daerah dapat kita baca pada laju grafik dibawah ini :

Grafik 2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Sosial TA 2024



Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2024 dalam kaitannya dengan pencapaian terhadap penyerapan pagu anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan indikator kinerja yang diharapkan. Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut.

1. Terbatasnya tersedianya dana pada Kas Daerah untuk sumber dana DBH maupun PAD pada 3 (tiga) triwulan awal, menyebabkan bidang teknis menunda pelaksanaan kegiatan / tidak melaksanakan kegiatan sehingga percepatan realisasi anggaran menumpuk pada triwulan terakhir dan penyerapan anggaran tidak maksimal.
2. Tidak tersalurnya Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu, yang bersumber dana sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR) sebesar Rp.810.000.000,00 karena adanya peraturan menteri keuangan nomor 55 tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
3. Validasi data calon penerima manfaat yang memakan waktu lama dari proses penyampaian data BNBA hingga tindak lanjut desa untuk memastikan kelayakan calon penerima manfaat,

Upaya mengatasi permasalahan agar kedepannya penyerapan anggaran dan capaian kinerja lebih optimal dengan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu penganggaran dana untuk verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pemutakhiran data DTKS SIKS-NG
2. Perlu ditingkatkan keakuratan perhitungan kebutuhan anggaran sehingga pada saat perubahan anggaran tidak lagi terjadi kelebihan / kekurangan penganggaran.
3. Mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi dalam proses administrasi penatausahaan keuangan untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan administrasi dalam proses pencairan dana,

Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;

3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Adanya kegiatan Asistensi / Pendampingan dan Rekonsiliasi sehingga pelaporan dapat lebih akurat dan tepat waktu.

2.5 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.5.1 Kinerja Pelayanan Dari Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial termasuk dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya urusan pemerintahan bidang Sosial telah ditetapkan kebijakan umum SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti (bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis); serta
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Penerapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) SPM Sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100 seratus persen dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar

- Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
dan
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Adapun realisasi SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target NSPK	Realisasi Capaian	Kategori
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	60	100 %	80 %	Tuntas Pratama
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	18	100 %	100 %	Tuntas Paripurna
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	10	100 %	100 %	Tuntas Paripurna
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	7	100 %	100 %	Tuntas Paripurna
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	164	100 %	100 %	Tuntas Paripurna

Permasalahan dan Kendala dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2024 antara lain :

1. BNBA penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis memerlukan assesment ulang
2. Kendala terbatasnya ketersediaan sumber dana, menyebabkan kegiatan terealisasi di triwulan terakhir
3. Kendaraan Operasional untuk penyaluran Bantuan Korban Bencana yang dalam kondisi kurang maksimal sehingga jangkauan pendistribusian dan ketepatan waktu penyaluran bantuan bencana kurang maksimal
4. Kurangnya kompetensi SDM Kesos untuk memberikan layanan Psikososial

5. Keluarga / Masyarakat yang kurang peduli dengan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan dan pengemis. Khususnya Penanganan kasus penyandang disabilitas mental (ODGJ) yang masih belum maksimal, karena kurangnya dukungan keluarga pasca rehabilitasi sosial
6. Rumah singgah belum berfungsi karena sarana dan prasarana belum memadai (masih dalam proses pembangunan, dengan target operasional tahun 2025)

2.5.2 Kinerja Pelayanan Dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2024

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dengan focus sasaran pada pembangunan Sumber Daya Manusia dibidang kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah individu, keluarga, kelompok atau komunitas masyarakat yang mengalami nasib kurang beruntung atau mengalami hambatan baik secara fisik maupun sosial psikologis yang disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial atau yang termasuk pada kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, sebagaimana telah diatur kembali dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, ada 26 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sedangkan yang termasuk kedalam Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) meliputi 12 (dua belas) potensi.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Data Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terdata dan tertangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2024

NO	PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	TAHUN 2024		SUMBER DATA*
		YANG TERDATA (JUMLAH JIWA)	YANG TERTANGANI (JIWA)	
1	Anak balita terlantar	1	1	Bid. Resos Dinsos
2	Anak terlantar / yatim piatu	325	325	Bid. Resos Dinsos
3	Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	7	7	Bid. Resos Dinsos
4	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	2	2	Bid. Resos Dinsos
5	Lanjut Usia	1.603	210	Bid. Resos Dinsos
6	Penyandang Disabilitas	320	115	Bid. Resos Dinsos
7	Gelandangan	3	3	Bid. Resos Dinsos
8	Pengemis	2	2	Bid. Resos Dinsos
9	Pemulung	2	2	Bid. Resos Dinsos
10	Kelompok Minoritas	6	-	Bid. Resos Dinsos
11	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	218	-	Bid. Resos Dinsos
12	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	6	6	Bid. Resos Dinsos
13	Korban Bencana Alam / Non Alam	45	45	Bid. Penanganan Bencana
14	Korban Bencana Sosial	119	119	Bid. Penanganan Bencana
15	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	37	37	Bid. Resos Dinsos
16	Fakir Miskin	41.046	41.015	Bid. Linjamsos
17	Keluarga bermasalah sosial psikologis	4	4	Bid. Dayasos
JUMLAH		43.746	41.893	JIWA

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024

NO	POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	JUMLAH	SERTIKAT KOMPETENSI / AKREDITASI	SUMBER DATA
1	Pekerja Sosial (Profesional)	9	1	Data Peksos Dinsos Tahun 2024
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	7	3	Data BNBA PSM Kab. Seruyan
3	Taruna siaga Bencana (TAGANA)	63	63	SK Tagana
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	9	3	Daftar Direktori LKS LKSA
5	Karang taruna	56		Data BNBA Karang Taruna Kab. Seruyan
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1		SK Bupati tentang LK3
7	Keluarga pioneer	2		
8	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	10	3	SK Kemensos tt TKSK
9	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	0		
10	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0		
11	Penyuluh Sosial Masyarakat	3	3	
12	Dunia Usaha	5		Data Dunia Usaha Penyelenggara Kessos / CSR
JUMLAH PSKS		165	76	

2.5.3 Capaian Kinerja Pelayanan Sarana Sosial

Sarana Sosial berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari LKS dan LKSA sangat penting karena sebagai wadah untuk mendapatkan layanan kesejahteraan untuk masyarakat dan anak-anak tidak mampu atau tidak memiliki keluarga, berikut data LKS yang terdapat di Kabupaten Seruyan :

Tabel 2.12
Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan LKS

LKSA	Capaian Kinerja Pelayanan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lembaga Kesejahteraan Sosial	4	5	5	6	9

Pada tahun 2024 Lembaga Kesejahteraan Sosial terdaftar di Dinas Sosial berjumlah 9 LKS yang terdiri dari LKSA Nuruzh zholam, LKSA Mahad Hidayatul Amin, LKSA Hj. Maskacil, LKSA Al Mustaghfirin,

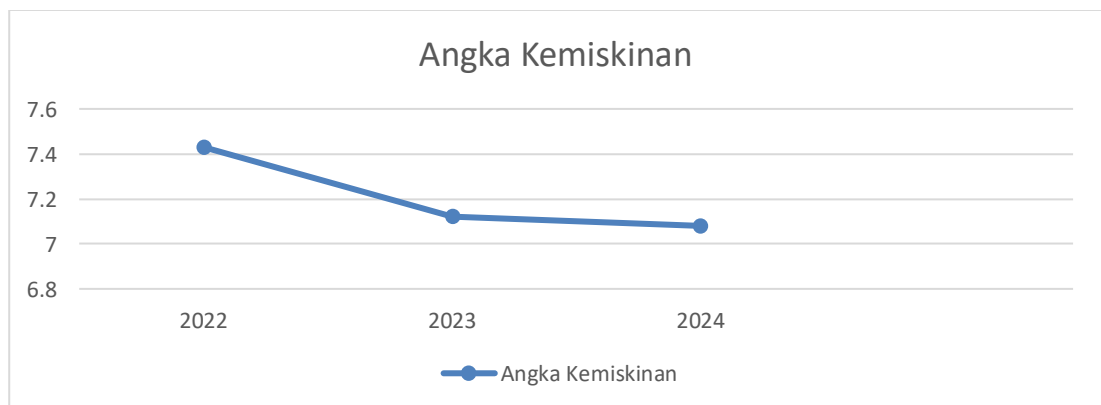
LKSA Hidayatul Salikin, LKSA Rodatul Tolibin, LKSA Darul Madani, LKSA Al Ma'arif dan LKS Seruyan Peduli.

2.5.4 Capaian Atas Asersi Sektor Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Perbandingan data Kemiskinan di Kabupaten Seruyan tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Data Kemiskinan Kabupaten Seruyan

No	Kemiskinan	2022	2023	2024	Kenaikan / Penurunan
1	Persentase Penduduk Miskin (PO) (Persen)	7,43	7,12	7,08	0,04



Dari grafik dapat dilihat Angka Kemiskinan Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, terlihat dari Persentase penduduk miskin yang turun 0,04% dari angka kemiskinan Tahun 2024 sebesar 7,08% berbanding Tahun 2023 sebesar 7,12%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat mengalami kenaikan sehingga jumlah penduduk miskin yang berada

dibawah garis kemiskinan semakin berkurang, berbanding lurus dengan indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan yang juga menurun.

Kemiskinan tidak hanya berarti kekurangan finansial, tetapi juga mencakup kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan menjadi isu strategis daerah karena dampaknya yang luas dan mendalam terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dari masalah pangan, kesehatan, pendidikan, hingga ketidakstabilan sosial, dampak kemiskinan merembet ke berbagai sektor dan memperburuk kondisi kehidupan secara keseluruhan.

Pengentasan kemiskinan menjadi tantangan bagi pemerintah yang memerlukan upaya terpadu dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Upaya pengentasan kemiskinan haruslah bersifat komprehensif, mencakup penyediaan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta perbaikan infrastruktur dan layanan publik. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, siklus kemiskinan dapat diputus dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Peranan Dinas Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Seruyan terkait dengan Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Seruyan. Tagging Pengentasan Kemiskinan Dinas Sosial dilaksanakan dalam 5 Program 8 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan Langkah strategis yang dilaksanakan Dinas Sosial yaitu :

1. Menurunkan beban pengeluaran, melalui penyaluran Bansos PKH, Program Sembako, Bansos Penerima Bantuan Iuran (PBI), Bansos Iklim, Bansos Permakanan, Bansos Sandang, Bansos Alat Bantu penyandang disabilitas, Bansos untuk Korban bencana alam / sosial dan Bansos lainnya.
2. Meningkatkan pendapatan, melalui Pelatihan kewirausahaan,

motivasi dan edukasi, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Bansos Barang stimulan usaha, pelatihan bina remaja, pelatihan keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Upaya Pengentasan Kemiskinan dari Dinas Sosial dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dengan klasifikasi permasalahan, sasaran, rencana aksi dan realisasi sebagai berikut :



Tabel 2.14
Laporan Rencana Aksi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Hasil Capaian	Penjelasan Rencana Aksi	Output		Target				Total	Jenis Kegiatan Aksi (terkait/ tidak terkait langsung dengan masyarakat/ Stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	PENJELASAN PELAKSANAAN RENAksi S.D TW 4	REALISASI ANGGARAN S.D TW 4	LINK DATA DUKUNG RENAksi
							Satuan	Indikator	T W I	TW II	TW III	TW IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Data kemiskinan belum terpadu (penggunaan basis data yang berbeda antar masing-masing OPD)	Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial - DTKS)	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin (DTKS) Cakupan Kabupaten	80%	Pelaksanaan Pendataan dan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). SIKS-NG merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data yang telah di survey oleh Sagis Mobile. Sagis Mobile merupakan aplikasi yang digunakan untuk survei kelurahan terhadap KPM	Hasil pelaksanaan pendataan dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). SIKS-NG merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data yang telah di survey oleh Sagis Mobile. Sagis Mobile merupakan aplikasi yang digunakan untuk survei kelurahan terhadap KPM	Pendataan, Verifikasi dan Validasi data terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Perlindungan Sosial yang lengkap dan akurat. Pengelolaan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); pemadanan data DTKS dengan NIK	55.387 KPM	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada DTKS	0	0	20.000	35.387	55.387	Ya	169.420.000	Pendataan, Verifikasi dan Validasi data terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Perlindungan Sosial yang lengkap dan akurat. Pengelolaan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); pemadanan data DTKS dengan NIK	168.618.935	https://drive.google.com/file/d/1s3s09nub9m5f81uuyhYurDu8hDals/view?usp=drive_link
Perlindungan dan Jaminan Sosial yang belum maksimal (Saldo nol, KPM yang dikeluarkan otomatis dari DTKS, alamat KPM yang tidak ditemukan dan warga miskin yang belum mendapat bantuan sosial)	Terfasilitasinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada DTKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	80%	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Hasil dari fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga adalah: Dinoso Sosial menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada menterian Sosial, KPM yang telah lulus dan memiliki usaha rintisan akan mendapatkan bantuan pelatihan dan bimbingan	Kegiatan Sosialisasi, pendampingan penyaluran dan monitoring evaluasi bantuan sosial sumber dana DBHDR untuk warga kawasan pinggir hutan untuk 1000 KPM (300 / bin, selama 3 bin). Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Bansos lainnya	10.000 KPM	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0	0	5.000	5.000	10.000	Ya	1.207.990.000	Pendampingan penyaluran Bantuan Sosial PKH dan Sembako dilaksanakan pada triwulan III, Bulan Juli dan Agustus sebanyak 2.068 KPM dan yang melakukan pencarian sebanyak 662 KPM bertempat di Bank Mandiri dan Kantor Pos di Kabupaten Seruyan.	295.592.432	https://drive.google.com/file/d/1rCj0N1wV_3p8atwV_cT2d4vawmLue7/view?usp=drive_link
Belum maksimalnya pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Dasar terhadap penyandang disabilitas terlarut, anak terlarut, lanjut usia terlarut, gelandangan pengemis dan PMKS lainnya (aksesibilitas penyandang disabilitas masih rendah, anak terlarut, lanjut usia terlarut, gelandangan pengemis dan PMKS lainnya yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya)	Terlaksananya pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi terlarut, lanjut usia terlarut, anak terlarut, lanjut usia terlarut, gelandangan pengemis dan PMKS lainnya di luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial	100%	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAFZA di Luar Panti Sosial	Pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlarut, anak terlarut, lanjut usia terlarut, gelandangan, dan pengemis di luar panti sosial, serta rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dilakukan oleh Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial.	Pengadaan paket makanan untuk lansia terlarut sesuai standar gizi minimal, Pengadaan sandang / peralatan sholat untuk anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSAs), Penyediaan Alat Bantu penyandang disabilitas, Pelayanan Reunifikasi Keluarga bagi penyandang disabilitas mental (ODGJ) dan orang terlarut, Pengiriman anak-anak terlarut / putus sekolah untuk mendapatkan pelatihan di PSBR, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga dan bansos barang stimulan usaha, Fasilitasi pembuatan identitas diri, fasilitasi pembuatan jaminan kesehatan/ BPJS, Layanan Data dan Pengaduan, Layanan Kedaruratan, Pelayanan Penelusuran Keluarga, Layanan Rujukan ke RS/ Panti Sosial/ Balai Rehabilitasi dan Karjasama pelayanan rehabilitasi sosial antara Dinoso - Panti Sosial dan RS/ RSJ.	399 Orang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya	92	92	123	92	399	Ya	452.404.050	Koordinasi ke Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso, Solo. Terkait Layanan PPKS Kabupaten Seruyan, Wilayah Kerja Kalimantan Tengah, Monitoring Pelatihan merias dan menjahit bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Panti Sosial Karya Wanita Palangka Raya, Rujukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dari RS, Murjani ke Panti Sosial Bina Laras (PSL) Pambelum Palangka Raya, Asesmen PPKS (ODGJ dan Lansia Terlarut di Desa Durian Tenggul Kec. Seruyan Tengah.	360.230.192	https://drive.google.com/file/d/1vup41P8w4XQ_3VW0/view?usp=drive_link
Rendahnya pemahaman tentang perizinan pengumpulan uang / barang dan perizinan undian gratis berhadiah, dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatnya pemahaman dari LKS /Instansi /Lembaga Penyelenggara PUB dan UGB	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	75%	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penyelenggaraan UGB dan PUB	Pelaksanaan Sosialisasi penyelenggaraan perizinan pengumpulan uang / barang dan perizinan undian gratis berhadiah, Penerbitan PUB dan UGB dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2	2	3	3	10	Ya	17.000.000	Penerbitan Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang/Barang (PUB)	14.526.900	https://drive.google.com/file/d/1E18E5LE8EwM0Mykxi11DB-efg05fir7km/view?usp=drive_link
Rendahnya Kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial program pengentasan kemiskinan	Terlaksananya pengembangan kompetensi bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), PSKS Keluarga dan	Persentase Meningkatnya kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial	100%	Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kessos)	Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial (Kessos) dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: Pelatihan kompetensi teknis, Pembinaan karier, Pendidikan profesi, Praktek pekerjaan sosial. Kompetensi SDM Kessos meliputi kompetensi dasar, kompetensi teknis, dan kompetensi ahli. Kompetensi ini merupakan kemampuan dan kapasitas yang	Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan sosial melalui pelatihan, pemberian motivasi dan edukasi, pelatihan kewirausahaan dan bantuan barang untuk stimulan usaha dan bantuan hibah operasional Lembaga Karang Taruna Kabupaten dan Kecamatan	4 orang / 2 keluarga 5 lembaga	Jumlah Orang / Keluarga / Lembaga yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	1 orang / 0 keluarga 1 lembaga	1 orang / 2 keluarga 2 lembaga	2 orang / 0 keluarga 2 lembaga	4 orang / 2 keluarga 5 lembaga	Ya	207.833.300	Monitoring dan Evaluasi Karang Taruna di Kecamatan Seruyan Raya	147.610.300	https://drive.google.com/file/d/1Q8cACy8GAS1R_vhGyR3D8eKq0FRk65C/view?usp=drive_link



	PSKS Kelembagaan Karang Taruna				dimiliki untuk melaksanakan tugas di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.														
Rendahnya Kompetensi SDM Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial terhadap keluarga yang bermasalah	Meningkatnya Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) terhadap keluarga yang bermasalah	Meningkatnya kompetensi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 LK3	Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti: Sosialisasi, Capacity building, Penyiapan persepsi. LK3 merupakan lembaga atau organisasi yang memberikan layanan kepada keluarga, seperti: Konseling, Konsultasi, Penyebaran informasi, Penjangkauan, Advokasi, Pemberdayaan.	Peningkatan kapasitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang memberikan pelayanan konsultasi, konseling, pemberian/penyebutan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan keluarga serta rujukan ke lembaga pelayanan lainnya.	1 orang	Jumlah Orang / pengurus LK3 yang meningkat kapasitasnya	0	0	0	1	1	Ya	20.000.000	Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3)	9.768.200	https://drive.google.com/file/d/1K8Noe9Pa2sm3Qk8S5Wkcp0f9xTMTU0E/view?usp=drive_link	
Jumlah																2.074.647.350		996.346.959	



2.6 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

Berdasarkan telaahan dan analisis dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Capaian Kinerja Dinas Sosial, isu-isu strategis internasional, isu-isu strategis nasional, isu-isu strategis regional, hingga observasi baik dari program kegiatan pembangunan dan sebagainya, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menjadi perhatian Dinas Sosial dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Sosial periode 2024-2026. Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Dinas Sosial dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagai peranan Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan sebagai salah satu andil Dinas Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Seruyan;
2. Melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIK-NG dan memvalidasi Basis Data Terpadu (BDT) dengan beberapa stakeholder terkait guna untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dijadikan data dasar dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Peningkatan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial yang optimal sebagai antisipasi Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Seruyan;
4. Penyempurnaan perencanaan dan penganggaran dalam mendukung pelaksanaan Program Kegiatan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial;
5. Perlunya Peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Sosial dalam penyelenggara pelayanan kesejahteraan

- sosial sebagai bentuk dukungan keterlibatan dalam penyelenggaraan kegiatan sosial
6. Peningkatan Sistem Terpadu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan partisipasi dari semua pihak terkait (pemerintah, swasta dan masyarakat), yang diimbangi dengan peningkatan instrumen pendukung layanan;

2.7 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Dari rancangan akhir RENJA Kabupaten Seruyan tahun 2026, sebagian besar telah disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan pembangunan tahun 2026 dan keselarasan anatar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.14
Analisa Kebutuhan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial (Keselarasan RKPD dan Renja)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET ANH R PERI ODE RESS FKA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ASH R PERIODE RENSTRA OPD	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	KESELARASAN ANTARA RKPD DAN RENJA		
				TAR	PAGU INDIKA	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS											NASIONAL	DAERAH
				GET 2025	TIF (Rp)															
	DINAS SOSIAL				5.783.347.586,00				DINAS SOSIAL			5.783.347.586,00								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.783.347.586,00				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.783.347.586,00								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.783.347.586,00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			5.783.347.586,00								
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.214.608.486,00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	5.214.608.486,00							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.353.210.950,00			16.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Keuangan (%)	100 Persentase	100%	4.353.210.950,00				Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keberbantuan kompetensi kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kabang Amanah 16. Program rutin kantor			
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	4.353.210.950,00	-		16.		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	4.353.210.950,00	Kab. Serang, Serang Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keberbantuan kompetensi kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kabang Amanah 16. Program rutin kantor			
1.06.01.2.02.05	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00			16.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persentase	100%	0,00				Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keberbantuan kompetensi kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kabang Amanah 16. Program rutin kantor			
1.06.01.2.05.03	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	63 Paket	0,00			16.		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	63 Paket	63 Paket	0,00	Kab. Serang, Serang Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keberbantuan kompetensi kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kabang Amanah 16. Program rutin kantor			
1.06.01.2.05.10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10 Orang	0,00			16.		Jumlah Pegawai yang Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	10 Orang	0,00	Kab. Serang, Serang Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keberbantuan kompetensi kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kabang Amanah 16. Program rutin kantor			
1.06.01.2.05.11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				153.754.600,00			16.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	153.754.600,00				Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keberbantuan kompetensi kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kabang Amanah 16. Program rutin kantor			
	Latrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan	Paket	2 Paket	2.399.300,00			16.		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan		2 Paket	2.399.300,00	Kab. Serang, Serang Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keberbantuan kompetensi kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kabang Amanah 16. Program rutin kantor			
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan	Paket	3 Paket	64.145.700,00			16.		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan		3 Paket	64.145.700,00	Kab. Serang, Serang Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keberbantuan kompetensi kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kabang Amanah 16. Program rutin kantor			



1.06.0 1.2.06. 04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diadikasikan	Paket	2 Paket	7.993.500,00	- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diadikasikan			2 Paket	7.993.500,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalangan Amanah 16.	DDNAS SOSIAL	Selaras	
1.06.0 1.2.06. 05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diadikasikan	Paket	3 Paket	13.365.000,00	- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diadikasikan			3 Paket	13.365.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalangan Amanah 16.	DDNAS SOSIAL	Selaras	
1.06.0 1.2.06. 06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diadikasikan	Paket	3 Paket	21.538.100,00	- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diadikasikan			3 Paket	21.538.100,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalangan Amanah 16.	DDNAS SOSIAL	Selaras	
1.06.0 1.2.07. 05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50 Laporan	44.313.000,00	- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50 Laporan	44.313.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalangan Amanah 16.	DDNAS SOSIAL	Selaras	
	Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	664.342.936,00	-	-	-	16.	Program rutin kantor	Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	664.342.936,00	-	-	-	-	16.	Program rutin kantor	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalangan Amanah 16.	DDNAS SOSIAL	Selaras
1.06.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	850 Laporan	2.200.000,00	- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			850 Laporan	2.200.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalangan Amanah 16.	DDNAS SOSIAL	Selaras	
1.06.0 1.2.08. 03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadikasikan	Laporan	1 Laporan	48.885.000,00	- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadikasikan			1 Laporan	48.885.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalangan Amanah 16.	DDNAS SOSIAL	Selaras	
1.06.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadikasikan	Laporan	3 Laporan	19.250.000,00	- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadikasikan			3 Laporan	19.250.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalangan Amanah 16.	DDNAS SOSIAL	Selaras	
1.06.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadikasikan	Laporan	1 Laporan	594.007.936,00	- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadikasikan			1 Laporan	594.007.936,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalangan Amanah 16.	DDNAS SOSIAL	Selaras	
	Pembelajaran Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	43.300.000,00	-	-	-	16.	Program rutin kantor	Pembelajaran Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang yang Dipelihara serahap Jumlah Seluruh Aset di Dinas Sosial	100%	100%	43.300.000,00	-	-	-	-	16.	Program rutin kantor	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalangan Amanah 16.	DDNAS SOSIAL	Selaras
1.06.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		Jumlah Laporan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorangan	Unit	10 Unit	17.500.000,00	- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Jumlah Laporan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorangan		30 Unit	10 Unit	17.500.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalangan Amanah 16.	DDNAS SOSIAL	Selaras	
1.06.0 1.2.09. 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		Jumlah Laporan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	4 Unit	25.800.000,00	- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Jumlah Laporan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan		12 Unit	4 Unit	25.800.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	16.	Program rutin kantor	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalangan Amanah 16.	DDNAS SOSIAL	Selaras	



1.06.02										1.06.02									
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
1.06.02.01	PROGRAM PEMBUDIDAYAAN SOSIAL	-	-	-	121.715.100,00	-	-	-	-	PROGRAM PEMBUDIDAYAAN SOSIAL	Pemertanian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	75%	80%	121.715.100,00	-	-	-	-	-
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	10.037.000,00	-	-	-	-	04. Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program pengumpulan sumbangan kemiskinan	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75%	75%	10.037.000,00	-	-	-	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.06.02.03										1.06.02.03									
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyerahan Iain Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang										Koordinasi dan Sinkronisasi Penyerahan Iain Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang									
1.06.02.03.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyerahan Iain Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	10 Dokumen	10.037.000,00	-	-	-	-	-	04. Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program pengumpulan sumbangan kemiskinan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyerahan Iain Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	50 Dokumen	10 Dokumen	10.037.000,00	-	-	-	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	111.678.100,00	-	-	-	-	04. Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program pengumpulan sumbangan kemiskinan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	163 Orang	163 Orang	111.678.100,00	-	-	-	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.06.02.03.02										1.06.02.03.02									
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2 Orang	0,00	-	-	-	-	-	04. Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program pengumpulan sumbangan kemiskinan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	2 Orang	0,00	-	-	-	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.06.02.03.03										1.06.02.03.03									
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota										Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2 Orang	0,00	-	-	-	-	-	04. Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program pengumpulan sumbangan kemiskinan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	2 Orang	0,00	-	-	-	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.06.02.03.04										1.06.02.03.04									
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota										Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									
	Jumlah Keluarga yang Mendapat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	2 Keluarga	17.694.500,00	-	-	-	-	-	04. Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program pengumpulan sumbangan kemiskinan	Jumlah Keluarga yang Mendapat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Keluarga	2 Keluarga	17.694.500,00	-	-	-	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.06.02.03.05										1.06.02.03.05									
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Mendapat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	5 Lembaga	70.393.600,00	-	-	-	-	-	04. Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program pengumpulan sumbangan kemiskinan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Mendapat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Lembaga	5 Lembaga	70.393.600,00	-	-	-	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing



No	Kategori	Penemuan Kembali Perbaikan Sesuai dengan Standar Uraian Minimal Keunggulan Kabupaten/Kota	Orang	50 Orang	11.406.000,00	- Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program yang mengganggu perkembangan	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menorita Pakan dan Keunggulan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Keunggulan Kabupaten/Kota	25 Orang	50 Orang	11.406.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir Timur, Pematang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kabupaten Amanah	Akselerasi pertumbuhan ekonomi			
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Sandang								Penyediaan Sandang													
1.06.04.2.01.04	Penyediaan Alat Baru								Penyediaan Alat Baru													
1.06.04.2.01.05	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Baru dan Alat Baru Peraga Sesuai kebutuhan Keunggulan Kabupaten/Kota	Orang	35 Orang	24.340.000,00	- Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program yang mengganggu perkembangan	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Baru dan Alat Baru Peraga Sesuai kebutuhan Keunggulan Kabupaten/Kota	25 Orang	15 Orang	24.340.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kabupaten Amanah	Akselerasi pertumbuhan ekonomi			
1.06.04.2.01.06	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Keunggulan Kabupaten/Kota	Orang	20 Orang	23.563.000,00	- Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program yang mengganggu perkembangan	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Keunggulan Kabupaten/Kota	26 Orang	20 Orang	23.563.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kabupaten Amanah	Akselerasi pertumbuhan ekonomi			
1.06.04.2.01.07	Pemberian Bimbingan Psik. Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Psik. Mental, Spiritual dan Sosial Keunggulan Kabupaten/Kota	Orang	5 Orang	9.777.000,00	- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program yang mengganggu perkembangan	Pemberian Bimbingan Psik. Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Psik. Mental, Spiritual dan Sosial Keunggulan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	9.777.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kabupaten Amanah	Akselerasi pertumbuhan ekonomi			
1.06.04.2.01.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Keunggulan Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang	26.454.500,00	- Kab. Seruyan, Danau Sekhik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program yang mengganggu perkembangan	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Keunggulan Kabupaten/Kota	12 Orang	10 Orang	26.454.500,00	Kab. Seruyan, Danau Sekhik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kabupaten Amanah	Akselerasi pertumbuhan ekonomi			
1.06.04.2.01.09	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Keunggulan Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang	200.000,00	- Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program yang mengganggu perkembangan	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Keunggulan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	00	200.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kabupaten Amanah	Akselerasi pertumbuhan ekonomi		
1.06.04.2.01.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Keunggulan Kabupaten/Kota	Orang	5 Orang	260.000,00	- Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program yang mengganggu perkembangan	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Keunggulan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	00	260.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kabupaten Amanah	Akselerasi pertumbuhan ekonomi		
1.06.04.2.01.11	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Orang	30 Orang	1.580.000,00	- Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program yang mengganggu perkembangan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Keunggulan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	0,00	1.580,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kabupaten Amanah	Akselerasi pertumbuhan ekonomi		



1.06.0 6.2.01. 04	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi										Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi									
		Jumlah Tempat Penampungan Keunggulan Kabupaten/Kota	Unit	10 Unit	7.889.000,00	- Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	15.	Prioritas Lainnya	Jumlah Tempat Penampungan Keunggulan Kabupaten/Kota	30 Unit	10 Unit	7.889.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Mengembangkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,kerjasama kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intelektif Aparatur untuk Kalangan Amanah	PPKS (KOBIAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL)	Selaras
1.06.0 6.2.01. 05	Pengangan Khusus bagi Kelompok Rentan										Pengangan Khusus bagi Kelompok Rentan									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Peningkatan Khusus bagi Kelompok Rentan Keunggulan Kabupaten/Kota	Orang	20 Orang	21.048.000,00	- Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	15.	Prioritas Lainnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Peningkatan Khusus bagi Kelompok Rentan Keunggulan Kabupaten/Kota	60 Orang	20 Orang	21.048.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Mengembangkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,kerjasama kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intelektif Aparatur untuk Kalangan Amanah	PPKS (KOBIAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL)	Selaras
1.06.0 6.2.02	Pelayanan Dukungan Psikososial										Pelayanan Dukungan Psikososial									
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kabupaten/Kota	Orang	100 Orang	17.106.500,00	- Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	15.	Prioritas Lainnya	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kabupaten/Kota	300 Orang	100 Orang	17.106.500,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Mengembangkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,kerjasama kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intelektif Aparatur untuk Kalangan Amanah	PPKS (KOBIAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL)	Selaras
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesapsagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	31.792.000,00	-	-	15.	Prioritas Lainnya	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesapsagaan Bencana Kabupaten/Kota	71 Kampung	71 Kampung/Orang	31.792.000,00	-	-	-	Membangun Lingkungan Hidup, Mengembangkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mempercepat pengmbangan kawasan food estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kaleng Kuat	PPKS (KOBIAN BENCANA ALAM/SOSIAL YANG MEMERLUKAN TRAUMA HEALING)	Selaras
1.06.0 6.2.02. 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana										Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana									
		Jumlah Kampung yang Melakukan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kabupaten/Kota	Kampung	2 Kampung	12.876.000,00	- Kab. Seruyan, Danau Sembuluh, Telaga Pulang - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir Timur, Karitika Bhakti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	15.	Prioritas Lainnya	Jumlah Kampung yang Melakukan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kabupaten/Kota	2 Kampung	2 Kampung	12.876.000,00	Kab. Seruyan, Danau Sembuluh, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Seruyan Hilir Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Mengembangkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mempercepat pengmbangan kawasan food estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kaleng Kuat	PPKS (KOBIAN BENCANA ALAM/SOSIAL YANG MEMERLUKAN TRAUMA HEALING)	Selaras
1.06.0 7	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana										Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana									
		Jumlah Orang yang Melakukan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kabupaten/Kota	Orang	69 Orang	18.916.000,00	- Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	15.	Prioritas Lainnya	Jumlah Orang yang Melakukan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kabupaten/Kota	207 Orang	69 Orang	18.916.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Danau Sembuluh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Mengembangkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mempercepat pengmbangan kawasan food estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kaleng Kuat	PPKS (KOBIAN BENCANA ALAM/SOSIAL YANG MEMERLUKAN TRAUMA HEALING)	Selaras
1.06.0 7.2.01. 01	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN										PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN									
			-	-	28.285.000															
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	28.285.000,00	-	-	04. Strukturisasi, harmonisasi dan integrasi program penganggaran			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 Makam	3 Makam	28.285.000,00				Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,kerjasama kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intelektif Aparatur untuk Kalangan Amanah	TAMAN MAKAM PAHLAWAN AN	Selaras
1.06.0 7.2.01. 02	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	14.521.000,00	- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Rantau Pulut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Strukturisasi, harmonisasi dan integrasi program penganggaran		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	14.521.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Rantau Pulut Kab. Seruyan, Danau Sembuluh, Telaga Pulang Kab. Seruyan, Hantau, Pembuang Hulu II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Rehabilitasi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mengoptimalkan penerapan e-governance, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,kerjasama kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intelektif Aparatur untuk Kalangan Amanah	TAMAN MAKAM PAHLAWAN AN	Selaras

2.8 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Proses pengajuan usulan kegiatan masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dilakukan melalui proses partisipatif. Usulan diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik usulan dari desa / kelurahan (musrenbang, musdes / muskel), Pokok-pokok pikiran DPRD, usulan dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan/aduan, usulan melalui perguruan tinggi, usulan dari SKPD terkait lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten yang langsung diajukan kepada Dinas Sosial, maupun usulan yang berdasarkan hasil pengumpulan informasi mandiri Dinas Sosial dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Penelitian yang dimaksud adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.

Beberapa garis besar permasalahan pembangunan bidang Sosial yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seruyan tentang Penyampaian Hasil Reses dalam rangka penyusunan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Aspirasi Masyarakat. Pada tahun 2024 tidak ada Pokok-Pokok Pikiran DPRD terkait bidang Sosial, namun ada usulan aspirasi masyarakat yang terkompilasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai berikut :

Tabel 2.12
Aspirasi Masyarakat untuk Bidang Sosial

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	OPD TUJUAN	TINDAK LANJUT
1	KADES SEMBULUH II	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Bedah Rumah Lansia	Desa Sembuluh II, Kab. Seruyan	Danau Sembuluh	Sembuluh II	DINAS SOSIAL	Diarahkan pengusulan ke Dinas PERKIMTAN
2	KADES SEMBULUH II	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Bantuan Peralatan Untuk Tunawisma	Desa Sembuluh II, Kab. Seruyan	Danau Sembuluh	Sembuluh II	DINAS SOSIAL	Dilakukan Assesment kebutuhan
3	KADES SEMBULUH II	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Pembuatan Taman Lansia	Desa Telaga Pulang, Kab. Seruyan	Danau Sembuluh	Sembuluh II	DINAS SOSIAL	Diarahkan pengusulan ke Dinas PUPR



4	KADES MUARA DUA	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Pengadaan bantuan penyandang disabilitas	Desa Muara Dua, Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Muara Dua	DINAS SOSIAL	Dilakukan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat
5	LURAH KUALA PEMBUANG II	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Kursi Roda	Jl. Ais Nasution, Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang II	DINAS SOSIAL	Dilakukan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat
6	KADES PEMATANG LIMAU	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Desa Pematang Limau/UPT. Tanggul	Seruyan Hilir	Pematang Limau	DINAS SOSIAL	Dilakukan Assesment kebutuhan
7	KADES PERSIL RAYA	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	bantuan sembako	desa persil raya, Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Persil Raya	DINAS SOSIAL	Dilakukan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat
8	KADES PERSIL RAYA	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	bantuan untuk masyarakat miskin	desa persil raya, Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Persil Raya	DINAS SOSIAL	Dilakukan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat
9	KADES SUNGAI UNDANG	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	PKH	desa Sungai Undang, Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Sungai Undang	DINAS SOSIAL	Dilakukan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat
10	KADES BANGKAL	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Dibutuhkan Pembangunan Kantor BPD	desa Bangkal, Kab. Seruyan	Seruyan Raya	Bangkal	DINAS SOSIAL	Diarahkan pengusulan ke Dinas PUPR / DD



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selaras dan berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) selama periode 2025-2029.

Penentuan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada Tahun 2024-2026 yaitu didasarkan pada Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 serta mempedomani Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Visi pembangunan Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 dirumuskan setelah mengkaji kondisi umum daerah, menganalisis potensi dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan (stakeholder) yang kemudian dirumuskan sebagai berikut :



Secara filosofi, visi tersebut mencerminkan makna dan harapan besar bagi Kabupaten Seruyan untuk terus berkembang dibidang ekonomi

dengan dengan tetap mempedomani pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang lestari, masyarakat yang sejahtera dan wilayah yang maju serta pemerintah yang amanah dan adil. Secara lebih rinci, Visi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

“Berkelanjutan” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkontribusi dalam menerapkan tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keadilan dan kehidupan sosial Masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kualitas kehidupan saat ini dan generasi mendatang.

“Sejahtera” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan **mewujudkan** sumber daya manusia yang berkualitas dengan tepenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, jaminan sosial dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis, rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kebahagiaan yang relatif lebih tinggi dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan cerdas.

“Maju” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk menciptakan daya saing ekonomi yang inklusif dan kolaboratif **dengan** daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi daerah yang dimaknai dengan peningkatan pendapatan PAD dan DBH melalui peningkatan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya daerah.

“Adil” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berpegang teguh untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tanpa diskriminasi sesuai dengan pengembangan potensi daerah yang mengedepankan persatuan dari semua pihak. Selain itu, menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum, penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.



“Amanah” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan menjamin terwujudnya pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan membentuk masyarakat yang sadar dalam hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, transparan, responsif, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, komitmen dan tanggung jawab yang baik antara pemimpin dan masyarakat.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk periode 2025-2029, antara lain:

- MISI I : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul.
- MISI II : Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif
- MISI III : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik
- MISI IV : Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana
- MISI V : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah

Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Seruyan, Dinas Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian misi ke I Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia, dan pengentasan kemiskinan. Selain mendukung misi tersebut, penguatan tata kelola penyelenggaraan urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial juga akan memiliki kontribusi pada pencapaian misi Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik yang termuat dalam misi ke-III.

Untuk pengukuran pencapaian Misi I dan Misi III, RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 menetapkan indikator kabupaten, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang didukung Dinas Sosial

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET RPJMD					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul	Terwujudnya kemandirian daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan ketahanan pangan	Menurunnya kemiskinan (Sasaran ke-5)	Tingkat Kemiskinan	6,36%	6,20%	5,50%	5,10%	5,06%	5,01%
III	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik	Terwujudnya tata kelola birokrasi yang berkualitas dan inovatif dalam mendukung pemerataan pembangunan serta kemandirian desa	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (Sasaran ke-1)	Nilai SAKIP	71	73	74	75	76	77

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL

Berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029, maka ditentukan tujuan strategis (*strategic goal*) yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi tersebut dan *ultimate outcome* Sektor Pengentasan Kemiskinan yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Seruyan, serta permasalahan dan isu-isu staretgis pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Seruyan yang.

Berikut perumusan tujuan (*intermediate outcome*) dan sasaran Rencana Stategis Dinas Sosial tahun 2025-2029 dengan relevansi terhadap Sasaran RPJMD :

Tabel 3.2
Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

NSPK SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Menurunnya kemiskinan (Misi I, Sasaran ke-5)	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Indikator Tujuan : Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	95%	90%	85%	80%	75%	75%	
		Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indikator Sasaran : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Sosial	58	60	62	64	66	66	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 (Urusan Wajib Sosial) Renstra Dinas Sosial adalah Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Indikator Tingkat Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan Sasaran Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani, ditetapkan target merata maksimal 100% (seratus persen) dalam setiap tahun. Diharapkan kelompok sasaran 12 PAS dapat terdata dan tertangani secara optimal selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan jumlah PPKS bisa menurun secara signifikan.

Tujuan 2 (Urusan Penunjang) Renstra Dinas Sosial adalah Mewujudkan tata Kelola Dinas Sosial yang transparan, akuntabel dan kapabel, dengan Indikator Nilai Kematangan Lembaga Dinas Sosial, dan Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas Sosial, ditetapkan target menurun secara bertahap dalam setiap tahun. Di harapkan peningkatan kualitas pelayanan publik pelayanan sosial

dan administrasi baik dari segi SDM, anggaran dan sarana / prasarana dapat mendukung tercapainya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

3.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang didasarkan pada potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki, dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika pembangunan daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut dan juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan arah kebijakan Renja Dinas sosial Kabupaten Seruyan 2026 maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam



program dan kegiatan dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Dinas Sosial dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana dan lokasi masing-masing kegiatan.

- b. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan pagu indikatif merupakan kebutuhan dana bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan, setiap tahun sampai dengan Tahun 2026.
- c. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Dinas Sosial, selanjutnya dijadikan acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Perencanaan program dalam dokumen Dinas Sosial harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD, yang di dukung dengan program-program sebagai berikut :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 - b. Program Pemberdayaan Sosial;
 - c. Program Rehabilitasi Sosial;
 - d. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan



- e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f. Program Penanganan Bencana;
- g. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;

3.2.1 Program Dinas Sosial berdasarkan Urusan Wajib (Urusan Sosial)

Program Kegiatan Utama yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang Sosial terdiri atas 5 (lima) program, 8 (delapan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 bidang teknis di Dinas Sosial. Berikut rincian program utama Urusan Wajib :

Tabel 3.3
Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Pelaksana Urusan Wajib Bidang Sosial pada Renja 2026

1	2	4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		17
			7	8	
			Target	Pagu	
UNSUR WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN				540.454.100	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	100	121.715.100	
	2. Persentase Lembaga di Bidang Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	100		
	3. Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan	%	100		
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	%	100	10.037.000	
1.06.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	15	10.037.000	
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	111.678.100	
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	2	17.694.500	
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	6	70.393.600	
1.06.02.2.03.0005 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapat peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	2	9.905.000	
1.06.02.2.03.0006 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat dan/atau TKSK yang meningkat kapasitasnya	Orang	20	13.685.000	
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%	100	3.823.000	
1.06.03.2.01. - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	%	100	3.823.000	
1.06.03.2.01.0001 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	3.823.000	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	145.673.500	



	2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100		
	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100		
	4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100		
	5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100		
1.06.04.2. - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	100	141.133.500	
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70	26.477.000	
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	11.406.000	
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	24.340.000	
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	23.563.000	
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	9.777.000	
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	26.454.500	
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2	260.000	
1.06.04.2.01.0009 -Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	1.580.000	
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	900.000	
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	2.349.000	
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	13.827.000	
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	200.000	
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan yang dipenuhi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	%	100	4.540.000	
1.06.04.2.02.0010 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	3	4.540.000	
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	150.000.000	
	Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	%	100		
	Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	70		
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	1,5		
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	%	100	150.000.000	
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	Orang	39.500	48.607.000	
1.06.05.2.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7.714	29.170.000	
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	2.800.000	
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	4	69.423.000	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	119.242.500	
	2. Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100		
	3. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100		



1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	%	100	87.450.500	
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	21.996.000	
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	19.411.000	
1.06.06.2.01.0003 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	10	21.048.000	
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	17.106.500	
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	7.889.000	
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota	%	100	31.792.000	
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	Kampung	2	12.876.000	
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	69	18.916.000	
				540.454.100	

3.2.2. Program Dinas Sosial berdasarkan Urusan Penunjang

Program Kegiatan yang melaksanakan urusan penunjang terdiri atas 2 (dua) program, 5 (kegiatan) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 bidang teknis di Dinas Sosial. Berikut rincian program utama Urusan penunjang :

Tabel 3.4
Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Pelaksana Urusan Penunjang pada Renja 2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN		KET
			2026		
			Target	Pagu	
1	2	4	7	8	17
UNSUR WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN				5.242.893.486	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.242.893.486	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	5.214.608.486	
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	%	100	4.353.210.950	
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	26	4.353.210.950	
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	%	100	153.754.600	
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2.399.300	
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	14.145.700	
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	7.993.500	
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	13.365.000	



1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	21.538.100	
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	94.313.000	
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	664.342.936	
1.06.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100	2.200.000	
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	48.885.000	
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	19.250.000	
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	594.007.936	
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	43.300.000	
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	17.500.000	
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	25.800.000	
1.06.07 - PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	%	100	28.285.000	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	%	100	28.285.000	
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Dokumen	2	14.521.000	
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	7.494.000	
1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	1	6.270.000	
				5.242.893.486	

Jumlah program urusan wajib dan urusan penunjang yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebanyak 7 (tujuh) program dan 13 (tiga Belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) Sub Kegiatan. Pemilihan program dan kegiatan sudah berdasarkan kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Kebutuhan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program kegiatan Tahun 2026 berdasarkan usulan perangkat daerah sebesar **Rp. 5.783.347.586,-**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas sosial Kabupaten Seruyan 2025-2029, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan . Penyajian program dan kegiatan Dinas Sosial dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2025 sampai dengan 2029 serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana dan lokasi masing-masing kegiatan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Renstra Dinas Sosial, selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Renja. Perencanaan program dalam dokumen Dinas Sosial dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah di bidang sosial untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam Rencana Kerja, serta menjadi dasar dalam penyusunan / penjabaran KUA PPAS

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan. Kegiatan dimaksud adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran Dinas Sosial.

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2026

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2026 disusun menurut Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan dasar bidang Sosial. Rekapitulasi Pagu Anggaran Belanja Dinas Sosial pada Tahun 2026 sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Pagu Anggaran Belanja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1.	DINAS SOSIAL	Rp. 5.783.347.586

Dari perencanaan pagu anggaran 2026 sebesar Rp.5.783.347.586 dapat dijabarkan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 4.2

Matrik Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		KET
			Target	Pagu	
			7	8	
1	2	4			17
UNSUR WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN				5.783.347.586	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.783.347.586	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	5.214.608.486	
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	%	100	4.353.210.950	
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	26	4.353.210.950	APBD
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	%	100	153.754.600	
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2.399.300	APBD
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	14.145.700	APBD
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	7.993.500	APBD
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	13.365.000	APBD
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	21.538.100	APBD
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	94.313.000	APBD
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	664.342.936	



1.06.01.208.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		100	2.200.000	APBD
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		3	48.885.000	APBD
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		3	19.250.000	APBD
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		8	594.007.936	APBD
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100	43.300.000	
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		10	17.500.000	APBD
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		4	25.800.000	APBD
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%		100	121.715.100	
	2. Persentase Lembaga di Bidang Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%		100		
	3. Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan	%		100		
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	%		100	10.037.000	
1.06.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen		15	10.037.000	APBD
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	%		100	111.678.100	
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga		2	17.694.500	APBD
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga		6	70.393.600	APBD
1.06.02.2.03.0005 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapat peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat		2	9.905.000	APBD
1.06.02.2.03.0006 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat dan/atau TKSK yang meningkatkan kapasitasnya	Orang		20	13.685.000	APBD
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%		100	3.823.000	
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	%		100	3.823.000	
1.06.03.2.01.0001 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		3	3.823.000	APBD
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%		100	145.673.500	
	2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%		100		
	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%		100		
	4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%		100		
	5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%		100		
1.06.04.2. - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%		100	141.133.500	
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		70	26.477.000	APBD
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		10	11.406.000	APBD
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		10	24.340.000	APBD
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		20	23.563.000	APBD



1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	9.777.000	APBD
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	26.454.500	APBD
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2	260.000	APBD
1.06.04.2.01.0009 -Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	1.580.000	APBD
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	900.000	APBD
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	2.349.000	APBD
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	13.827.000	APBD
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	200.000	APBD
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan yang dipenuhi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	%	100	4.540.000	
1.06.04.2.02.0010 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	3	4.540.000	APBD
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	150.000.000	
	Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	%	100		
	Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	70		
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	1,5		
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	%	100	150.000.000	
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	Orang	39.500	48.607.000	APBD
1.06.05.2.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7.714	29.170.000	APBD
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	2.800.000	APBD
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	4	69.423.000	APBD
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	119.242.500	
	2. Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100		
	3. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100		
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	%	100	87.450.500	
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	21.996.000	APBD
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	19.411.000	APBD
1.06.06.2.01.0003 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	10	21.048.000	APBD
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	17.106.500	APBD
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	7.889.000	APBD
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota	%	100	31.792.000	
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	Kampung	2	12.876.000	APBD
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	69	18.916.000	APBD



1.06.07 - PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	%		100	28.285.000	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	%		100	28.285.000	
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Dokumen		2	14.521.000	APBD
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam		1	7.494.000	APBD
1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan		1	6.270.000	APBD
					5.783.347.586	

4.2 MATRIK RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel 4.3
Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Seruyan tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						5.783.347.586,00							9.310.192.100,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.783.347.586,00							9.310.192.100,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						5.783.347.586,00							9.310.192.100,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja</i>	-			100 %	5.214.608.486,00						-	7.301.752.100,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu</i>	-			100 %	0,00				5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-	-	353.888.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				20 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-		149.993.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				25 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				25 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				25 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				25 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-		159.408.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi	-		44.487.250,00	DINAS SOSIAL



birokrasi, p encegahan dan
pembe rantasan korupsi.

1.06.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					10 Laporan	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-	0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-	0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-	0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-	0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	0,00			-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-	49.950.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-	0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				63 Paket	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-	0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				63 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-	0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-	0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				25 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-	0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-	49.950.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-	0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	153.754.600,00			-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	-	1.188.463.900,00	DINAS SOSIAL



birokrasi, p encegahan dan
pembe rantasan korupsi.

1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.399.300,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	16.674.400,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	64.145.700,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	295.485.350,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	7.993.500,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	24.754.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.365.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	127.551.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	21.538.100,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	62.392.150,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1406 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	14.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	44.313.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	647.606.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0,00			-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.	0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan	0,00	DINAS SOSIAL



										Kuala Pembuang II								kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pembe rantasan korupsi.					
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit		0,00		Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-						5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pembe rantasan korupsi.				0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit		0,00		Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-						5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pembe rantasan korupsi.				0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit		0,00		Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-						5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pembe rantasan korupsi.				0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit		0,00		Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-						5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pembe rantasan korupsi.				0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit		0,00		Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-						5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pembe rantasan korupsi.				0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %		664.342.936,00				-						5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pembe rantasan korupsi.				1.129.659.684,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				850 Laporan		2.200.000,00		Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-						5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pembe rantasan korupsi.				12.375.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan		48.885.000,00		Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-						5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pembe rantasan korupsi.				113.509.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan		19.250.000,00		Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-						5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pembe rantasan korupsi.				59.623.200,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan		594.007.936,00		Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-						5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pembe rantasan korupsi.				944.151.984,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %		43.300.000,00				-						5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pembe rantasan korupsi.				453.591.916,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit		17.500.000,00		Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-						5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, pencegahan dan pembe rantasan korupsi.				140.454.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				4 Unit		25.800.000,00		Kab. Seruyan, Seruyan Hilir,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-						5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi				90.950.000,00	DINAS SOSIAL



			(PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya																
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pariti Sosial		Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, dan Gelandangan Pengemis	-			100 %	141.133.500,00				Memperkuat penyelaan san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	329.480.000,00			DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	26.477.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaan san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		80.000.000,00			DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	11.406.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaan san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		4.000.000,00			DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	24.340.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaan san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		500.000,00	62		DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	23.563.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaan san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		000.000,00	80		DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kowenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	9.777.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaan san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		500.000,00	12		DINAS SOSIAL	



																		masyarakat yang adil dan makmur.						
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																							
		<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota</i>							17 Orang	26.454.500,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			000.000,00	50.				DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																							
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota</i>							5 Orang	260.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			00.000,00	3.0				DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																							
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>							20 Orang	1.580.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			00.000,00	7.5				DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																							
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>							5 Orang	900.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			5.000.000,00					DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																							
		<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>							5 Orang	2.349.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			17.500.000,00					DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																							
		<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>							15 Orang	13.827.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			7.000.000,00					DINAS SOSIAL	

													mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota					3 Orang	200.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelenggara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk perin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		480.000,00		DINAS SOSIAL			
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial	Persentase Layanan yang dipenuhi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial	-			100 %	4.540.000,00			Memperkuat penyelenggara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk perin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	138.960.000,00		DINAS SOSIAL			
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan					4 Orang	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelenggara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk perin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		0,00		DINAS SOSIAL			
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan					4 Orang	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelenggara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk perin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		0,00		DINAS SOSIAL			
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan					20 Orang	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelenggara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk perin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		20.000.000,00		DINAS SOSIAL			
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang					20 Orang	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelenggara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk perin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		5.000.000,00		DINAS SOSIAL			



															mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		25.000.000,00				DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		5.000.000,00				DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Komitran dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Komitran dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				3 Dokumen	4.540.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		15.500.000,00				DINAS SOSIAL
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ; Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi ; Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin ; Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergradasi dari Kemiskinan	-			100, 100, 70, 1,5 %	150.000.000,00						-	500.000.000,00				
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	-			100 %	150.000.000,00			Memperkuat penyalara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		500.000.000,00				DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				39500 Orang	48.607.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		200.000.000,00				DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	2.800.000,00	Kab. Seruyan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalara san kehidupan yang	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi,	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		100.000.000,00				DINAS SOSIAL



										Kecamatan, Semua Kel/Desa		harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	n Sosial (PPKS)			
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			10000 Orang	29.170.000,00			Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t penyalara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pemerlu Pelayana n Kesejahteraa n Sosial (PPKS)		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan			4 Usulan	69.423.000,00			Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t penyalara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pemerlu Pelayana n Kesejahteraa n Sosial (PPKS)		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana; Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya; Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	-		100, 100, 100 %	119.242.500,00								-	500.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	-		100 %	87.450.500,00					Memperku a t penyalara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pemerlu Pelayana n Kesejahteraa n Sosial (PPKS)	-	400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			100 Orang	21.996.000,00			Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t penyalara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pemerlu Pelayana n Kesejahteraa n Sosial (PPKS)		000.000,00	75. DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			60 Orang	19.411.000,00			Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a t penyalara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan	Pemerlu Pelayana n Kesejahteraa n Sosial (PPKS)		000.000,00	65. DINAS SOSIAL



												masyarakat yang adil dan makmur.						
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota					20 Orang	21.048.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota					100 Orang	17.106.500,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota					10 Orang	7.889.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota	-				100 %	31.792.000,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					2 Kampung	12.876.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					69 Orang	18.916.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			50.000.000,00	DINAS SOSIAL



7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	<i>Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik</i>	-			100 %	28.285.000,00			masyarakat yang adil dan makmur.			-	109.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</i>	-			100 %	28.285.000,00			-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk perin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan			109.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>				3 Dokumen	14.521.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk perin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan			76.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</i>				3 Makam	7.494.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk perin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan			21.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>				3 Laporan	6.270.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk perin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantasan kemiskinan			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
J U M L A H								5.783.347.586,00							9.310.192.100,00	

4.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

4.3.1 Program dan Kegiatan Pendukung Pengentasan Kemiskinan

Peranan Dinas Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Seruyan terkait dengan Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Seruyan. Tagging Pengentasan Kemiskinan Dinas Sosial dilaksanakan dalam 5 Program 5 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan yang terkait secara langsung atau yang mendukung (secara tidak langsung) upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Seruyan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Program Kegiatan Pendukung Pengentasan Kemiskinan

#REF!

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		KET
			Target	Pagu	
			7	8	
1	2	4	7	8	17
UNSUR WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN				540.454.100	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	100	121.715.100	
	2. Persentase Lembaga di Bidang Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	100		
	3. Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan	%	100		
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	%	100	10.037.000	
1.06.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	15	10.037.000	
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	111.678.100	
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	2	17.694.500	
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	6	70.393.600	
1.06.02.2.03.0005 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapat peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	2	9.905.000	
1.06.02.2.03.0006 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat dan/atau TKSK yang meningkatkan kapasitasnya	Orang	20	13.685.000	
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%	100	3.823.000	
1.06.03.2.01. - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	%	100	3.823.000	
1.06.03.2.01.0001 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarisasi	Orang	3	3.823.000	



Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	145.673.500	
	2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100		
	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100		
	4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100		
	5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100		
1.06.04.2. - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	100	141.133.500	
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70	26.477.000	
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	11.406.000	
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	24.340.000	
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	23.563.000	
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	9.777.000	
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	26.454.500	
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2	260.000	
1.06.04.2.01.0009 -Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	1.580.000	
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	900.000	
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	2.349.000	
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	13.827.000	
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	200.000	
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan yang dipenuhi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	%	100	4.540.000	
1.06.04.2.02.0010 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	3	4.540.000	
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	150.000.000	
	Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	%	100		
	Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	70		
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	1,5		
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	%	100	150.000.000	
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	Orang	39.500	48.607.000	
1.06.05.2.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7.714	29.170.000	
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	2.800.000	
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	4	69.423.000	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	119.242.500	
	2. Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100		



	3. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100		
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	%	100	87.450.500	
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	21.996.000	
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	19.411.000	
1.06.06.2.01.0003 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	10	21.048.000	
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	17.106.500	
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	7.889.000	
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota	%	100	31.792.000	
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	Kampung	2	12.876.000	
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	69	18.916.000	
				540.454.100	

Langkah strategis yang dilaksanakan Dinas Sosial yaitu :

1. Menurunkan beban pengeluaran, melalui penyaluran Bansos PKH, Program Sembako, Bansos Penerima Bantuan Iuran (PBI), Bansos lainnya, Bansos Perumahan, Bansos Sandang, Bansos Alat Bantu penyandang disabilitas.
2. Meningkatkan pendapatan, melalui Pelatihan kewirausahaan, motivasi dan edukasi, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Bansos Barang stimulan usaha, pelatihan bina remaja, pelatihan keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Upaya Pengentasan Kemiskinan dari Dinas Sosial dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dengan klasifikasi permasalahan, sasaran, rencana aksi dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 4.5
Rencana Aksi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan Tahun 2026

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Penjelasan Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Ateit (terkait/ tidak terkait langsung Dengan masyarakat / Stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator Bagian /Bidang	Pelaksana Dinas / Badan
Data kemiskinan belum terpadu (penggunaan basis data yang berbeda antar masing-masing OPD)	Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial - DTKS)	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten	100%	Pelaksanaan Pendataan dan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG)	Pendataan, Verifikasi dan Validasi data terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Perlindungan Sosial yang lengkap dan akurat; Pengelolaan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); pemadanan data DTKS dengan NIK	55.387 KPM	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada DTKS	0	0	20.000	35.387	55.387	Ya	48.607.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
Perlindungan dan Jaminan Sosial yang belum maksimal (Saldo nol, KPM yang dikeluarkan otomatis dari DTKS, alamat KPM yang tidak ditemukan dan warga miskin yang belum mendapat bantuan sosial)	Terfasilitasinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada DTKS yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	100%	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan Sosialisasi, pendampingan penyaluran dan monitoring evaluasi bantuan sosial sumber dana DBHDR untuk warga kawasan pinggir hutan untuk 1000 KPM (300 / bn, selama 3 bn), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Bansos lainnya	10.000 KPM	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0	0	5.000	5.000	10.000	Ya	101.393.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
Belum maksimalnya pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Dasar terhadap Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS lainnya (aksesibilitas penyandang disabilitas masih rendah, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS lainnya yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya)	Terlaksananya pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS lainnya diluar pant	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS lainnya yang terpenuhi Kebutuhannya di Luar Pant	100%	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pant Sosial; dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pant Sosial	Pengadaan paket makanan untuk lansia terlantar sesuai standar gizi minimal, Pengadaan sandang / peralatan sholat untuk anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Penyediaan Alat Bantu penyandang disabilitas, Pelayanan Reunifikasi Keluarga bagi penyandang disabilitas mental (ODGJ) dan orang terlantar, Penjarangan anak-anak terlantar / putus sekolah untuk mendapatkan pelatihan di PSBR, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga dan bansos barang simulan usaha, Fasilitas pembuatan identitas diri, fasilitas pembuatan jaminan kesehatan BPJS, Layanan Data dan Pengaduan, Layanan Kedaruratan, Pelayanan Penelusuran Keluarga, Layanan Rujukan ke RSJ/ Pant Sosial / Balai Rehabilitasi dan Kerjasama pelayanan rehabilitasi sosial antara Dinsos - Pant Sosial dan RS / RSJ.	399 Orang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya	92	92	123	92	399	Ya	149.496.500	Bidang Rehabilitasi Sosial	DINSOS
Rendahnya pemahaman tentang perizinan pengumpulan uang / barang dan perizinan undian gratis berhadiah, dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatnya pemahaman dari LK3 /Instansi/ Lembaga Penyelenggara PUB dan UGB	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	100%	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pelaksanaan Sosialisasi penyelenggaraan perizinan pengumpulan uang / barang dan perizinan undian gratis berhadiah, Penerbitan PUB dan UGB dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2	2	3	3	10	Ya	10.037.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	DINSOS
Rendahnya Kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial program pengentasan kemiskinan	Terlaksananya pengembangan kompetensi bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), PSKS Keluarga dan PSKS Kelembagaan Karang Taruna	Persentase Meningkatnya kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial	100%	Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kessos)	Peningkatan Kapasitas SDM kesejahteraan sosial melalui pelatihan, pemberian motivasi dan edukasi, pelatihan kewirausahaan dan bantuan barang untuk stimulan usaha dan bantuan hibah operasional Lembaga Karang Taruna Kabupaten dan Kecamatan	4 orang / 2 keluarga 5 lembaga	Jumlah Orang / Keluarga / Lembaga yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	1 orang / 0 keluarga 1 lembaga	1 orang / 2 keluarga 2 lembaga	2 orang / 0 keluarga 2 lembaga	4 orang / 2 keluarga 5 lembaga	Ya	101.773.100	Bidang Pemberdayaan Sosial	DINSOS
Rendahnya Kompetensi SDM Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial terhadap keluarga yang bermasalah	Meningkatnya Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) terhadap keluarga yang bermasalah	Meningkatnya kompetensi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 LK3	Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan kapasitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang memberikan pelayanan konsultasi, konseling, pemberian/penyebarnya informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan keluarga serta rujukan ke lembaga pelayanan lainnya,	1 orang	Jumlah Orang / pengurus LK3 yang meningkatkan kapasitasnya	0	0	0	1	1	Ya	9.905.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	DINSOS
Belum maksimalnya pelaksanaan program penanganan bencana terhadap korban bencana alam dan bencana sosial	Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan bencana sosial yang terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	100%	Pelaksanaan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial	perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial berupa penyediaan makanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus kelompok rentan dan layanan dukungan psikososial	164 orang	Jumlah Korban bencana alam / sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	14	50	50	50	164	ya	87.450.500	Penanganan Bencana	DINSOS
Masih rendahnya kompetensi anggota TAGANA dan KSB	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana bagi TAGANA dan masyarakat Kampung Siaga Bencana	Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota	100%	Koordinasi, Sosialisasi dan peningkatan kapasitas TAGANA dan KSB	Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan peningkatan kapasitas TAGANA dan KSB melalui sosialisasi dan pelatihan mitigasi dan tanggap darurat	69 orang dan 2 KSB	Jumlah TAGANA dan KSB yang meningkatkan kapasitasnya	0	0	69	2	71	Ya	31.792.000	Penanganan Bencana	DINSOS
Jumlah														540.454.100		

4.3.2 Program Dinas Sosial Pendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Dalam upaya penerapan Standar Pelayanan Minimal terdapat 2 (dua) Program, 2 (dua) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan yang mendukung upaya tersebut, yaitu :

Tabel 4.6
Tagging Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		KET
			Target	Pagu	
			7	8	
1	2	4	7	8	17
UNSUR WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN				228.584.000	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				228.584.000	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	141.133.500	
	2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100		
	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100		
	4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100		
1.06.04.2 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial	%	100	141.133.500	
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70	26.477.000	penguatan program prioritas SPM
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	11.406.000	
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	24.340.000	
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	23.563.000	
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	9.777.000	
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	26.454.500	
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2	260.000	
1.06.04.2.01.0009 -Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	1.580.000	
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	900.000	
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	2.349.000	
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	13.827.000	
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	200.000	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	87.450.500	
	2. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100		
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	%	100	87.450.500	
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	21.996.000	penguatan program prioritas Huma Betang

1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	19.411.000	
1.06.06.2.01.0003 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	10	21.048.000	
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	17.106.500	
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	7.889.000	
				228.584.000	

Selain penetapan program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang Sosial, sebagai tahap awal perencanaan juga ditetapkan target penerima layanan SPM berdasarkan basis data 3 tahun terakhir. Berikut Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2026 :

Tabel 4.7
Penetapan Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Sosial Tahun 2026

No.	Jenis pelayanan dasar	Indikator Pencapaian	Target Satuan	Batasan Waktu Capaian	Target Ketercapaian Penerima Layanan Dasar (%)	Target Pencapaian Mutu Minimal (%)	Target Populasi Penerima Layanan Dasar (orang)
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	80%	20%	50
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak telantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	80%	20%	10
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	80%	20%	20
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	80%	20%	6
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana kab/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun	80%	20%	250

4.4 INTEGRASI PROGRAM DINAS SOSIAL PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS JANJI POLITIK BUPATI, JANJI POLITIK GUBERNUR DAN JANJI POLITIK PRESIDEN TAHUN 2026

Dalam upaya dukungan terhadap Program Prioritas Janji Politik Bupati, Janji Politik Gubernur dan Janji Politik Presiden Tahun 2026 telah diintegrasikan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial yaitu :

Tabel 4.8
Integrasi Program Prioritas Janji Politik Bupati dengan Program Nomenklatur

No	Program Prioritas Janji Politik Bupati	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek Strategis	Lokasi	2026		Perangkat Daerah
								Volume	Pagu	
1	1500 Beasiswa Pendidikan Tinggi D3/D4/S1/S2/S3, 1000 STDB, dan Wajib Belajar 12 tahun									SETDA (BAG KESRA), DISDIK, BKAD
2	Transformasi tata kelola (digitalisasi) keuangan daerah									BKAD, BAPENDA, DISKOMINFO
3	Pemberdayaan UMKM pada berbagai sektor									DISKOPERINDAG, DPMDES, DISPORAPARBUD, DKPP, DISKAN
	1000 STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya)									DKPP, DISKAN
4	Bantuan bibit unggul, pupuk, alat dan mesin									DKPP, DISKAN, DLH
5	Peningkatan sarana dan prasarana bidang keagamaan secara menyeluruh (semua agama).									DINAS PUPR, SETDA (BAG KESRA)
6	Peningkatan kesejahteraan PNS, Pegawai Honorar, Unsur Pemerintahan dan Guru Keagamaan									BKPSDM, BKAD, DISDIK, SETDA (KESRA), DINSOS, DISKOMINFO
7	Peningkatan sarana prasarana sekolah umum, madrasah, pondok pesantren, sekolah minggu, dan sekolah keagamaan lainnya									DISDIK, SETDA (BAG KESRA), DISKOMINFO, DINAS PUPR
8	Peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas / transportasi, pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	70	26.477.000	SELURUH PERANGKAT DAERAH
					Penyediaan Sandang	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	10	11.406.000	
					Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	10	24.340.000	
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan reunifikasi Keluarga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	20	23.563.000	
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dan Pemberian Pelatihan bagi Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)	Kab. Seruyan	3	9.777.000	
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Seruyan	8	26.454.500	



					serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					
					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	2	260.000	
					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	10	1.580.000	
					Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Pelayanan Kedaruratan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	5	900.000	
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	5	2.349.000	
					Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	10	13.827.000	
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Kab. Seruyan	3	200.000	
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, PBI dan Bansos lainnya	Kab. Seruyan	7.714	29.170.000	
		Penanganan Bencana	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan	Penyediaan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Kab. Seruyan	50	21.996.000	
					Penyediaan Sandang	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Kab. Seruyan	30	19.411.000	
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Pengungsian untuk Korban Bencana	Kab. Seruyan	10	21.048.000	
					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Bantuan untuk Kelompok Rentan	Kab. Seruyan	10	17.106.500	
					Pelayanan Dukungan Psikososial	Pemberian Layanan Dukungan Psikososial dan Bantuan sosial	Kab. Seruyan	50	7.889.000	
9	Pembangunan dan peningkatan kapasitas perekonomian pada berbagai sektor utama, termasuk pendirian BUMD, Pendirian Perseroan Terbatas bidang Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, serta pengembangan BUMDES									DKPP, DISKAN, DISKOPERINDAG, DPMDES, DPMPTSP, SETDA (BAG EKONOMI), SETDA (BAG HUKUM)
10	Keberlanjutan Islamic Center dan Pelabuhan Sigintung									DINAS PUPR, DISHUB
11	Peningkatan Jaringan Listrik, Telekomunikasi, Internet, dan Air Bersih untuk Semua									DISKOMINFO, SETDA (BAG EKONOMI), DINAS PUPR, DISPERKIMTAN



Tabel 4.9
Integrasi Program Prioritas Janji Politik Gubernur dengan Program Nomenklatur

No	Program Prioritas Gubernur	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek Strategis	Lokasi	2026		Perangkat Daerah
								Volume	Pagu	
1	Kalteng Bermartabat									PUPR, KESBANGPOL
	- Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk menembus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir									
	- Memperluas sosialisasi diberbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjunjung spirit hidup beradat dalam berkompetensi diberbagai bidang guna membangun masyarakat kalteng yang berdaya saing									
2	Batang Maju									PUPR, DPMDES, DISKOMINFO, SETDA (BAG EKONOMI)
	- Pembangunan 1000 km jalan desa									
	- Revitalisasi infrastruktur lintas kota/kabupaten									
	- Pembangunan delta kalteng ekonomi eksklusif									
	- Peningkatan infrastruktur air bersih desa									
	- Peningkatan akses listrik desa, 100% bersinar									
	- Akses sinyal dan internet di daerah pedalaman									
3	Batang Makmur									DKPP, DISKOPERINDAG, DISKAN, DISNAKER, DINSOS
	- 2 juta rupiah per KK bantuan pangan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kab. Seruyan	39.500 orang	48.607.000	
	- Operasi pasar murah									
	- 250 miliarder muda baru									
	- Milenial job center									
	- Inkubasi UMKM									
	- Asuransi petani dan nelayan									
	- Bantuan perahu dan alat tangkap									
4	Batang Cerdas									DISDIK, SETDA (BAG KESRA)
	- Sekolah/kuliah gratis	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Surat Keterangan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Kab. Seruyan	100 suket	0	
	- 1 keluarga harus ada sarjana									
	- 1000 rumah guru									
	- Insentif guru agama									
	- Kalteng mengaji									
5	Batang Sehat									DINKES, BKPSDM, DP3AP2KB, DPMDES
	- Berobat gratis berbasis KTP									
	- Insentif tenaga kesehatan desa									
	- Revitalisasi puskesmas desa									
	- Pendampingan ibu hamil dan pasca hamil									
	- 1 desa 1 ambulans									
6	Batang Harmoni									DISPORAPARBUD, DPMDES, DAMKAR, PUPR, DISPERKIMTAN, DINSOS
	- Berdayakan 100 Dewi (Desa Wisata)									

- 150 Milyar Rupiah bantuan provinsi untuk kabupaten kota										
- 250 juta rupiah stimulus desa										
- Insentif kepala desa, BPD, damang, mantir, RT/RW se kalteng										
- Layanan cepat tanggap kebakaran lahan dan bantuan warga	Penanganan Bencana	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan	Penyediaan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Kab. Seruyan	50 orang	21.996.000		
				Penyediaan Sandang	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Kab. Seruyan	30 orang	19.411.000		
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Pengungsian untuk Korban Bencana	Kab. Seruyan	10 orang	21.048.000		
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Bantuan untuk Kelompok Rentan	Kab. Seruyan	10 orang	17.106.500		
				Pelayanan Dukungan Psikososial	Pemberian Layanan Dukungan Psikososial dan Bantuan sosial	Kab. Seruyan	50 orang	7.889.000		

Tabel 4.10
Integrasi Program Prioritas Janji Politik Presiden dengan Program Nomenklatur

No	Program Prioritas Presiden	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek Strategis	Lokasi	2026		Perangkat Daerah
								Volume	Pagu	
1	Pengentasan Kemiskinan	Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pelaksanaan Sosialisasi penyelenggaraan perizinan pengumpulan uang / barang dan perizinan undian gratis berhadiah, Penerbitan PUG dan UGB dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial, dan pembuatan Surat Rekomendasi PUB	Kab. Seruyan	15 rekomendasi	10.037.000	DINAS SOSIAL, SETDA (BAG KESRA), DKPP, DISKOPERINDAG, DISPERKIMTAN, DISKAN, DISDUKCAPIL, DINKES, DISDIK, DPMDIS, DISNAKER, DISKOMINFO, SETDA (BAG EKONOMI)
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan/pertemuan peningkatan kapasitas PSKS Keluarga, Assesment KPM yang diintervensi dan Bantuan Stimulan Pengembangan Usaha Keluarga	Kab. Seruyan	2 orang	17.694.500	
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kegiatan pengembangan kompetensi Relawan Sosial, sosialisasi nilai nilai kepahlawanan pada pelajar sma/smk, Kelembagaan pelestarian nilai nilai Keperintisan Sosial, Akreditasi LKS, movev karang taruna, penindakan LKS dan Verval LKS, MOnitoring dan Evaluasi LKS/ Verifikasi Tanda Daftar LKS dan Pelembagaan Sekolah Rakyat	Kab. Seruyan	6 lembaga	60.393.600	
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Sertifikasi kelembagaan LK3 dan uji kompetensi anggota LK3 dan fasilitasi dalam penanganan kasus keluarga bermasalah sosial	Kab. Seruyan	2 sertifikat	9.905.000	
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan kapasitas penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat dan/atau TKSK	Kab. Seruyan	20 orang	13.685.000	
		Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Reunifikasi warga korban tindak kekerasan ke tempat asalnya dan pendampingan kasus korban tindak kekerasan	Kab. Seruyan	3 orang	3.823.000	
		Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial	Penyediaan Perumahan	Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	70 orang	26.477.000	
					Penyediaan Sandang	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	10 orang	11.406.000	



				Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	10 orang	24.340.000	
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan reunifikasi Keluarga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	20 orang	23.563.000	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dan Pemberian Pelatihan bagi Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)	Kab. Seruyan	3 orang	9.777.000	
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Seruyan	8 orang	26.454.500	
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	2 orang	260.000	
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	10 orang	1.580.000	
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Pelayanan Kedaruratan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	5 orang	900.000	
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	5 orang	2.349.000	
				Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	10 orang	13.827.000	
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Kab. Seruyan	3 orang	200.000	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanaan	Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal bagi PPKS lainnya	Kab. Seruyan	-	-	
				Penyediaan Sandang	Penyediaan pakaian dan kelengkapan lainnya bagi PPKS lainnya	Kab. Seruyan	-	-	
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan bagi PPKS lainnya	Kab. Seruyan	-	-	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bagi PPKS lainnya	Kab. Seruyan	-	-	
				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial	Kab. Seruyan	-	-	
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Kab. Seruyan	-	-	
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi PPKS lainnya	Kab. Seruyan	-	-	
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga bagi PPKS lainnya	Kab. Seruyan	-	-	
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga bagi PPKS lainnya	Kab. Seruyan	-	-	
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota	Kerja Sama dengan Balai / Panti Rehabilitasi Sosial / Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa	Kab. Seruyan	3 dokumen	4.540.000	
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	Kab. Seruyan	39.500 orang	48.607.000	
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, PBI dan Bansos lainnya	Kab. Seruyan	7.714 keluarga	19.170.000	
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Verivali kelayakan dan Fasilitasi penyaluran Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Seruyan	20 orang	2.800.000	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kab. Seruyan	4 usulan	69.423.000	
		Penanganan Bencana	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan	Kab. Seruyan	50 orang	21.996.000	

					Penyediaan Sandang	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Kab. Seruyan	30 orang	19.411.000	
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Pengungsian untuk Korban Bencana	Kab. Seruyan	10 unit	21.048.000	
					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Bantuan untuk Kelompok Rentan	Kab. Seruyan	10 orang	17.106.500	
					Pelayanan Dukungan Psikososial	Pemberian Layanan Dukungan Psikososial dan Bantuan sosial	Kab. Seruyan	50 orang	7.889.000	
2	Penurunan Prevalensi Stunting	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)	Kab. Seruyan	3.612 KPM		DINKES, DP3AP2KB, DPMDES, DINSOS, DISDIK, DKPP, PUPR, DLH, DISKOMINFO, DISKAN, DISPERKINTAN
3	Program makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil									DISDIK, DINKES, SETDA (BAG KESRA), DKPP, DINSOS, DPMDES, DISKOMINFO
4	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam 5 Tahun dan Bangun RS Lengkap berkualitas di Kabupaten									DINKES, RSUD, PUPR, DISKOMINFO
5	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional									DKPP, DPMDES
6	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi									DISDIK, PUPR, DINSOS, DISKOMINFO
	- Sekolah Garuda									
	- Sekolah Rakyat	Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ kota	Pemberdayaan PSKS Kelembagaan Sekolah Rakyat	Kab. Seruyan	1 Lembaga	10.000.000	
7	Melanjutkan dan menambatkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Penyaluran Bantuan dan Pendistribusian Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS)	Kab. Seruyan	3.612 KPM	10.000.000	DINSOS, DISKOPERINDAG, DKPP, DINKES
8	Menaikkan gaji ASN (terutama Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan), TNI/POLRI dan Pejabat Negara									BKPSDM, DISDIK, DINKES
9	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menyediakan rumah murah bersantitas baik untuk yang membutuhkan									PUPR, DISPERKIMTAN, DPMDES

4.5 REKAPITULASI POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Tabel 4.11
Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2026

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUP ATEN /KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CAT ATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN /DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
1	1981228	21-01-2025	KADES BAHOUR	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Pengadaan Marbot Langgar Nurul Hikmah	RT. 004, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Hanau	Bahaur	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan disampaikan kepada PD terkait dengan memperhatikan usulan terhadap program prioritas dan ketersediaan anggaran pada tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilaksanakan pekerjaannya sesuai dengan RENJA dan anggaran yang ada	Ditolak, pengelolaan rumah ibadah bukan tugas dan fungsi dinas sosial
2	1984745	21-01-2025	LURAH KUALA PEMBUANG I	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	bantuan kursi roda	rt se kelurahan kuala pembuang I, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang I	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan disampaikan kepada PD terkait dengan memperhatikan usulan terhadap program prioritas dan ketersediaan anggaran pada tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Diproses, Agar disampaikan proposal lengkap BNBA, untuk dilaksanakan assesment kelayakan calon penerima manfaat
3	1984775	21-01-2025	LURAH KUALA PEMBUANG I	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	bantuan tongkat terapi	jl. tjilik riwut rt.30 rw.02, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang I	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan disampaikan kepada PD terkait dengan memperhatikan usulan terhadap program prioritas	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan	Diproses, Agar disampaikan proposal lengkap BNBA, untuk dilaksanakan assesment kelayakan



																dan ketersediaan anggaran pada tahun 2026		menyusuaikan anggaran yang tersedia	calon penerima manfaat
4	1984810	21-01-2025	LURAH KUALA PEMBUANG I	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	bantuan kaki palsu	jl. samudin rt.33 rw.01, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang I	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan disampaikan kepada PD terkait dengan memperhatikan usulan terhadap program prioritas dan ketersediaan anggaran pada tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Ditolak, Dinas Sosial tidak menganggarkan bantuan kaki palsu
5	1985216	21-01-2025	LURAH KUALA PEMBUANG I	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	bantuan tandu lipat	jl. ais nasution rt.01 rw.01, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang I	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan disampaikan kepada PD terkait dengan memperhatikan usulan terhadap program prioritas dan ketersediaan anggaran pada tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Diproses, Agar disampaikan proposal lengkap BNBA, untuk dilaksanakan assesment kelayakan calon penerima manfaat
6	1985237	21-01-2025	LURAH KUALA PEMBUANG I	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	bantuan alat pendengaran	rt sekelurahan kuala pembuang I, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang I	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan disampaikan kepada PD terkait dengan memperhatikan usulan terhadap program prioritas dan ketersediaan anggaran pada tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Diproses, Agar disampaikan proposal lengkap BNBA, untuk dilaksanakan assesment kelayakan calon penerima manfaat
7	2021391	23-01-2025	KADES MUARA DUA	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Pengadaan bantuan penyandang disabilitas/Penyakit menahun	Desa Muara Dua, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Muara Dua	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan disampaikan kepada PD terkait dengan memperhatikan usulan terhadap program prioritas dan ketersediaan anggaran pada tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Diproses, Agar disampaikan proposal lengkap BNBA, untuk dilaksanakan assesment kelayakan calon penerima manfaat
8	2023928	23-01-2025	KADES SUNGAI UNDANG	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Bantuan PKH	Semua RT, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Sungai Undang	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan diteruskan kepada PD terkait dengan memperhatikan Program prioritas dan ketersediaan Anggaran Tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Diproses, Agar disampaikan proposal lengkap BNBA, untuk dilaksanakan assesment kelayakan calon penerima manfaat
9	2024153	23-01-2025	KADES SUNGAI UNDANG	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Bantuan KIP bagi anak sekolah kurang mampu	RT 01 dan 04, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Sungai Undang	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan diteruskan kepada PD terkait dengan memperhatikan Program prioritas dan ketersediaan Anggaran Tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Ditolak, wewenang Dinas Sosial mengeluarkan Surat Keterangan terdarda dalam DTKD
10	2024748	23-01-2025	KADES PEMATANG LIMA	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma (memerlukan kursi roda, tongkat dan kaca mata	Desa Pematang Limau, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Pematang Limau	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan diteruskan kepada PD terkait dengan memperhatikan Program prioritas dan ketersediaan Anggaran Tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Diproses, Agar disampaikan proposal lengkap BNBA, untuk dilaksanakan assesment kelayakan calon penerima manfaat
11	2056059	24-01-2025	KADES PARING RAYA	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	2 Orang Petugas Marbot Mesjid	Desa Paring Raya, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Hanau	Paring Raya	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan diteruskan kepada PD terkait dengan memperhatikan Program prioritas dan ketersediaan Anggaran Tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilaksanakan pekerjaannya sesuai dengan RENJA dan anggaran yang ada	Ditolak, pengelolaan rumah ibadah bukan tugas dan fungsi dinas sosial
12	2059798	24-01-2025	KADES PERSIL RAYA	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Bantuan kepada masyarakat miskin	Desa, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Persil Raya	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan diteruskan kepada PD terkait dengan memperhatikan Program prioritas dan ketersediaan Anggaran Tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Diproses, Agar disampaikan proposal lengkap BNBA, untuk dilaksanakan assesment kelayakan calon penerima manfaat
13	2060294	24-01-2025	KADES PERSIL RAYA	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Bantuan sosial penanggulangan bencana	Desa, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Persil Raya	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan diteruskan kepada PD terkait dengan memperhatikan Program prioritas dan ketersediaan Anggaran Tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Diproses, akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan korban bencana



BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Sosial (RENJA) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Subtansi RENJA ini merupakan hasil sinkronisasi antara pelaku kepentingan dan stakeholder dengan memperhatikan permasalahan yang faktual dihadapi di wilayah Kabupaten Seruyan. Di sisi yang lain, RENJA Tahun 2026 ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026, serta dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Kedisiplinan dan komitmen bersama sangat menentukan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan tahunan ini. Dengan demikian kepada sekretariat dan Bidang agar :

1. Terus melengkapi data dan informasi untuk program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan guna mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan bersangkutan.
2. Mendokumentasikan dan mengkaji hasil pelaksanaannya ditingkat Dinas Sosial Kabupaten Seruyan untuk kemudian melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara lengkap sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja dan mempermudah penyusunan program dan kegiatan selanjutnya.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan seluruh pihak terkait guna konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RENJA 2026 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Dinas Sosial berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, utamanya program dan kegiatan pembangunan, yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan.
2. Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan langkah awal penyusunan RKA sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Sosial (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.
3. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2026 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/ sumber dana lainnya) dalam rangka menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan.
4. Dinas Sosial wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RENJA Tahun 2026 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan serta mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah.



5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan.
6. Kepala Dinas melalui Subbag Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2026.
7. Dinas Sosial pada akhir Tahun 2026 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Seruyan Tahun 2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Tahun 2026. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya.

Selama realisasi pelaksanaan RENJA Tahun 2026, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan.



Kuala Pembuang, 22 Juli 2025

Kepala Dinas,

ANGGA, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680405 198703 1 010